

**KEPENTINGAN TIONGKOK DALAM KERJASAMA *REGIONAL*  
*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP* PADA MASA  
PEMERINTAHAN XI JINPING TAHUN 2012-2017**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RIDHO RAKHMAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **KEPENTINGAN TIONGKOK DALAM KERJASAMA *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP* PADA MASA PEMERINTAHAN XI JINPING TAHUN 2012-2017**

Oleh

**RIDHO RAKHMAN**

*Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) merupakan salah satu kerjasama regional di bidang ekonomi. RCEP merupakan kerjasama yang diinisiasikan oleh Tiongkok yang diikuti oleh lima belas anggota di antaranya sepuluh negara anggota ASEAN, Korea Selatan, India, Jepang, Australia, dan Selandia baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepentingan apa sajakah yang ingin dicapai oleh Tiongkok dalam kerjasama RCEP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data analisis data sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa ada tiga kepentingan Tiongkok dalam RCEP, yaitu : kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan kepentingan rivalitas Tiongkok-Amerika Serikat terutama di kawasan Asia Tenggara. Dalam setiap kepentingan tersebut memiliki beberapa faktor pendorong bagi Tiongkok. Faktor pendorong kepentingan ekonomi yang dimiliki Tiongkok ialah keuntungan dalam sumber daya alam, sumber daya manusia, dan yang ketiga yaitu memudahkan jalur masuk perdagangan dan investasi. Faktor pendorong kepentingan politik Tiongkok ialah untuk memperkuat citra sebagai negara *super power*, kedua yaitu untuk menguasai bidang ekonomi di antaranya perdagangan barang dan jasa, dan, sektor investasi, untuk mempertahankan hegemoni pada sektor perdagangan khususnya dengan negara-negara ASEAN. Faktor kepentingan dalam rivalitas Tiongkok-Amerika Serikat, yaitu untuk meminimalisir ancaman dari tindakan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Tiongkok, serta untuk menggusur hegemoni Amerika Serikat pada bidang ekonomi di beberapa sektor.

Kata kunci : Kerjasama Ekonomi, Kepentingan, Tiongkok, RCEP.

## **ABSTRACT**

### **THE INTEREST OF TIONGKOK IN THE COOPERATION OF REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP IN THE XI JINPING GOVERNMENT IN 2012-2017**

**By**

**RIDHO RAKHMAN**

The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is one of the regional cooperation in the economic sector. RCEP is initiated by China which is attended by fifteen members including ten ASEAN member countries, South Korea, India, Japan, Australia and New Zealand. This study aims to examine what interests that China wants to achieve from RCEP. This study uses a qualitative approach with secondary data analysis data collection techniques. This study found that there were three Chinese interests in RCEP, such as economic interests, political interests, and the interests of China-United States rivalry. In each of these interests has several driving factors for China. The driving factor for economic interests that China has is profits in natural resources, human resources, which facilitates trade and investment entry points. The driving factor for China's political interests is to strengthen the image as a super power country, to control the economic sector, including trade in goods and services, and, the investment sector, and to maintain hegemony in the trade sector especially with ASEAN countries. A factor in the rivalry between China and the United States, namely to minimize the threat of actions taken by the United States towards China, and to displace US hegemony in the economic sector in several sectors.

**Key words** : Economic Cooperation, Interest, Tiongkok, RCEP.

**KEPENTINGAN TIONGKOK DALAM KERJASAMA *REGIONAL*  
*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP* PADA MASA  
PEMERINTAHAN XI JINPING TAHUN 2012-2017**

Oleh

**RIDHO RAKHMAN**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : *Kepentingan Tiongkok Dalam Kerjasama *Regiona Comprehensive Economic Partnership* Pada Masa Pemerintahan Xi Jinping Tahun 2012-2017*

Nama Mahasiswa : Ridho Rakhman

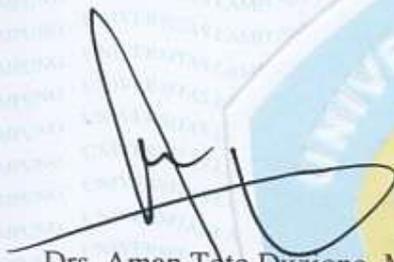
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516071055

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

### MENYETUJUI

#### 1. Komisi Pembimbing



Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.  
NIP. 19570728198703006



Astiwi Inayah, S.IP., M.A.  
NIK. 231601910502201

#### 2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional



Drs. Ari Darmastuti, M.A.  
NIP. 19600416 198603 2 002

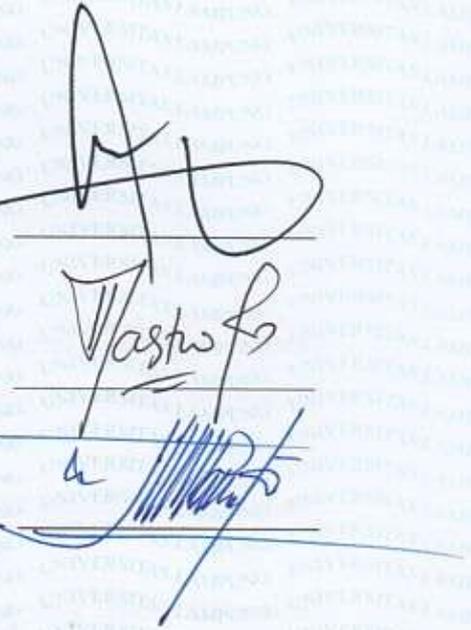
**MENGESAHKAN**

Tim Penguji

Ketua : Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.

Sekretaris : Astiwi Inayah, S.IP., M.A.

Penguji  
Bukan Pembimbing : Dr. Supto, S.Sos., M.AB.



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Dr. Syarif Makhya, M.Si.**  
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 1 Juli 2019

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 1 Juli 2019

pernyataan,



Ridho Rakhman  
NPM. 1516071055

## RIWAYAT HIDUP



*Ridho Rakhman lahir di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1997. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara pasangan bapak Mukjizat, S.sos.,M.S.I. dan ibu Masrani. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDI Assa'adah Jakarta Timur dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP)*

*di SMPN.194 Jakarta Timur yang diselesaikan pada tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN. 107 Jakarta Timur dan lulus pada tahun 2015.*

*Pada tahun yang sama penulis dinyatakan berhasil di terima sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti program pertukaran pelajar ke Tiongkok melalui program yang diselenggarakan AIESEC pada tahun 2017. Penulis juga sempat mengikuti acara MUN atau Model United Nations yang diselenggarakan di Madrid Univesity, Spanyol.*

***MOTTO***

*Do Not To Find Out Your Personal Identity, Just Create It.*

*(Wayne Dyer)*

*“Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai  
Dengan Kadar Kesanggupannya”*

*(QS Al Bawarah : 286)*

## **PERSEMBAHAN**



*Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya*

*Kecilku ini Kepada :*

*Kedua Orang Tuaku*

*Terimakasih Untuk Semua Kasih Sayang Dan  
Pengorbanannya selama ini. Hidup Merantau Hampir Empat  
Tahun Membuat Saya Sadar Bahwa Hidup Jauh Dari  
Keluarga Ialah Salah Satu Hal Terberat Dalam Membentuk  
Jati Diri.*

## SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “**Kepentingan Tiongkok Dalam Kerjasama *Regional Comprehensive Economic Partnership* Pada Masa Pemerintahan Xi Jinping Tahun 2012-2017**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku pembimbing pertama skripsi. Terima kasih atas jasa, ilmu, saran, masukan, serta dukungan moril yang sangat berguna bagi pengembangan diri penulis. Mohon maaf penulis sampaikan jika terdapat tindakan tercela selama proses bimbingan yang dilakukan penulis. Doa dan dukungan Bapak Aman sangat berguna bagi penulis sebagai bekal untuk masa depan.
3. Bapak Dr. Suropto, S.Sos., M.AB selaku dosen pembahas yang selalu memberikan pandangan kehidupan mengenai konsep usaha, ikhtiar, dan tawakal kepada penulis serta membantu membangun logika penulis dalam penulisan skripsi. Terima kasih bapak selalu memberikan semangat dan doa agar penulis sukses dalam segala hal.
4. Mba Astiwi Inayah, S.IP., M.A. selaku pembimbing skripsi yang selama ini selalu membimbing dan memotivasi penulis dalam merangkai cita-cita dan masa depan. Terima kasih telah menjadi sosok panutan yang sangat baik, yang penuh perhatian dan pengetahuan sehingga selalu membantu berbagai kesulitan yang penulis alami.

Penulis juga berharap mba Tiwi senantiasa diberikan kelancaran dalam hidup dan kesehatan.

5. Bapak Mukjizat dan Ibu Masrani selaku kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan selalu ingin penulis banggakan dan bahagiakan. Terima kasih sudah memahami dengan sabar hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, perhatian, kasih sayang, doa, dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis selama ini. Mohon maaf untuk baba dan mama penulis sampaikan jika selama ini ada sikap penulis yang membebankan maupun mengecewakan baba dan mama. Penulis juga senantiasa berharap baba dan mama selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah SWT.
6. Irma Tata Manggala, Aditya Pratama, Firly Ramadhan, Abdurahman Wahid, Kent Ramadhan, Azizul Kohar Terimakasih sudah menemani penulis dalam mengerjakan penelitian atau mengerjakan tugas-tugas lainnya. Penulis berharap dalam waktu dekat kita dapat mencapai kesuksesan sesuai yang kita harapkan.
7. Saka Dete dan Meka Nurhadi selaku kakak tingkat yang penulis sayangi. Terima kasih sudah menjadi kakak dan sekaligus contoh panutan yang baik, dan menjadi teman berkumpul. Terima kasih bang Saka atas semua bantuan yang sudah diberikan disaat kepada penulis.
8. Staff Jurusan, Dekanat, Universitas terima kasih telah berperan dan membantu penulis dalam segala urusan administrasi yang diperlukan.
9. Dosen-dosen Jurusan Hubungan Internasional terima kasih atas seluruh ilmu yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar dan tepat waktu..
10. Teman-teman Hubungan Internasional angkatan 2015. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih sudah berbagai tawa, cerita dan kesulitan bersama. Maaf jika selama ini penulis pernah melakukan

perbuatan maupun perkataan yang kurang mengenakan, sungguh penulis tidak bermaksud demikian.

11. Untuk orang-orang yang belum disebutkan dan tidak mungkin untuk disebutkan. Penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya, yang pernah terjadi dahulu telah membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan memberikan pembelajaran yang sangat bermakna bagi penulis. Maaf atas kesalahan yang pernah penulis lakukan di masa itu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaa, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua. Amin.

Bandar Lampung, 1 Juli,2019  
Penulis,

**Ridho Rakhman**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>III</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>IV</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>V</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	9
2.2. Landasan Teoritis .....	17
2.2.1 Konsep Kerjasama Internasional .....	18
2.2.2 Konsep Kepentingan Nasional .....	22
2.2.3 Teori Ekonomi Politik .....	23
2.2.4 <i>Power Transition Theory</i> .....	26
2.3. Kerangka Pemikiran .....	29
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	31
3.2. Fokus Penelitian .....	32
3.3. Sumber Data .....	33
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.5. Teknik Analisis Data .....	34
3.5.1. Reduksi Data .....	34
3.5.2. Penyajian Data .....	34
3.5.3. Penarikan Kesimpulan .....	35
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>36</b>
4.1. Keikutsertaan Tiongkok Dalam Kerjasama Ekonomi Regional .....	37
4.2. Kerjasama RCEP .....	40
4.3. Fokus Kepentingan Tiongkok di Bidang Kerjasama Ekonomi .....	49

<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
5.1. Angka Perekonomian Tiongkok Tahun 2010-2017 .....	61
5.1.1. Angka Pertumbuhan GDP Tiongkok .....	62
5.1.2. Angka GNP Tiongkok.....	65
5.1.3. Angka FDI Tiongkok .....	67
5.1.4. Angka Ekspor Tiongkok.....	72
5.1.5. Angka Impor Tiongkok .....	75
5.1.5. Angka Konsumsi Tiongkok.....	77
5.2. Motif Kepentingan Tiongkok Dalam Kerjasama RCEP .....	79
5.2.1. Motif Kepentingan Ekonomi.....	79
5.2.2. Motif Kepentingan Politik .....	84
5.2.3. Motif Kepentingan Rivalitas Tiongkok-Amerika Serikat.....	87
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>91</b>
6.1. Kesimpulan.....	91
6.2. Saran.....	92
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Komparasi Penelitian Terdahulu .....	16
4.1. Kerjasama Regional Tiongkok.....	39
5.1. Peringkat GNP Terbesar.....	66
5.2. Angka Investasi Tiongkok dengan Jepang .....	68
5.3. Peringkat Investasi dengan ASEAN.....	71
5.4. Ekspor Impor Tiongkok Dengan Jepang.....	71
5.5. Pendapatan Ekspor Terbesar dengan ASEAN.....	74
5.6. Angka Impor Terbesar dengan ASEAN.....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Perkembangan Perjanjian Pasar Bebas .....	2
1.2. Grafik Ekspor dan Impor Tiongkok dengan ASEAN.....	4
2.1. Model Kerangka Pemikiran Penelitian .....	30
5.1. Data Peningkatan GDP Tiongkok Tahun 2010-2017 .....	62
5.2. Persentasi Indikator GDP Tiongkok.....	63
5.3. Data Peringkat GDP Terbesar 2009-2017.....	64
5.4. Data GNP Tiongkok.....	65
5.5. Angka FDI <i>Outflow</i> Tiongkok.....	67
5.6. Angka FDI <i>Outflow</i> Tiga Negara Terbesar.....	68
5.7. Angka Investasi Tiongkok ke ASEAN .....	69
5.8. Angka FDI <i>Inflow</i> Tiongkok .....	71
5.9. Angka Perbandingan Ekspor Tiongkok Dengan Amerika .....	72
5.10. Angka Ekspor Tiongkok-ASEAN .....	73
5.11. Angka Impor Tiongkok.....	75
5.12. Angka Impor Tiongkok dan Amerika Serikat .....	77
5.13. Angka Konsumsi Tiongkok.....	78

## DAFTAR SINGKATAN

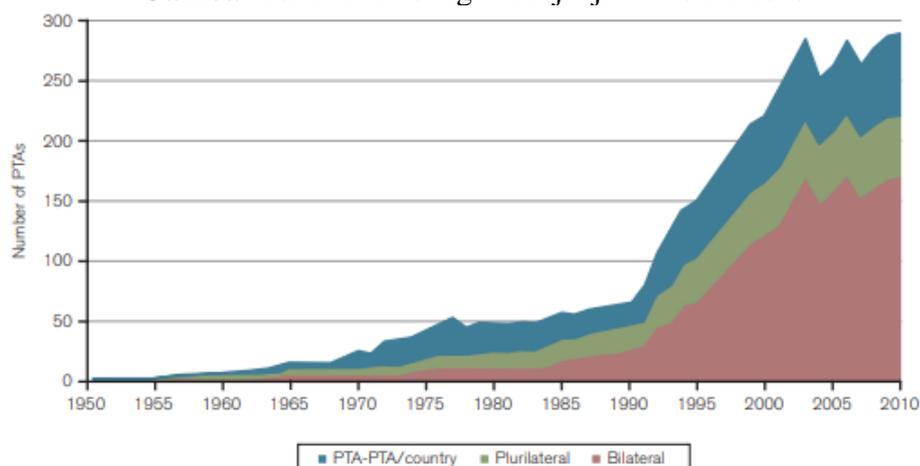
AFTA	: ASEAN Free Trade Area
APEC	: Asia Pasific Economic Cooperation
ASEAN	: Association of Southeast Asia Nations
CAFTA	: China-ASEAN Free Trade Area
EFTA	: European Free Trade Association
FOCAC	: Forum on China-Africa Cooperation
FDI	: Foreign Direct Investment
FTA	: Free Trade Area
GATT	: General Agreement on Tariffs and Trade
GDP	: Gross Domestic Product
GNP	: Gross National Product
NAFTA	: North Amerika Free Trade Area
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
RCEP	: Regional Comprehensive Economic Partnership
TPP	: Trans-Pacific Partnership
UN	: United Nations
WTO	: World Trade Organizations

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Semakin berkembangnya kondisi ekonomi serta politik global, telah membentuk beberapa sistem dalam bidang perekonomian dari berbagai negara di seluruh dunia. Di antara sistem tersebut terdapat salah satu sistem yang mengalami perkembangan cukup signifikan yaitu sistem perdagangan bebas atau terintegrasinya pasar global yang menjanjikan kemudahan serta keuntungan di dalam penciptaan sistem tersebut. Dalam sistem inipun dikenal upaya untuk mengurangi hambatan – hambatan dalam perdagangan bebas, seperti kontrol suatu tariff dan juga pembatasan kuota subsidi impor dan ekspor. *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) merupakan salah satu bentuk integrasi pasar atau kerjasama perdagangan bebas yang diresmikan pada tahun 2012 di Kamboja dan diinisiasi oleh Tiongkok. Kerjasama ini diikuti oleh seluruh negara *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) serta enam negara lainnya yaitu Tiongkok, Jepang, India, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru. Dibawah ini terdapat data yang menunjukkan perkembangan dari sistem perdagangan bebas yang mengalami peningkatan jumlah kerjasamanya.

**Gambar 1.1** Perkembangan Perjanjian Pasar Bebas

Note: "Bilateral" PTAs consist of two parties only, "plurilateral agreements" of three or more. The category "PTA-PTA/country" denotes PTAs, where an existing PTA has engaged in an agreement with another country, including through accession, or with another existing PTA.

**Sumber : [www.wto.org](http://www.wto.org)**

Kegiatan kerjasama perdagangan menjadi salah satu indikator penting bagi suatu negara dalam meningkatkan intensitas power negara tersebut. Hal inipun memiliki kesamaan seperti asumsi yang diungkapkan oleh A.F.K Organski dalam bukunya yang berjudul "World Politics", yaitu:

*"one of the most important determinants of a nation's power is its economic organizations, or more specifically, the degree to which it has industrialized. We have already seen that natural resources do not contribute to a nation power unless they are developed, and their development is a question of technology and economic organization."*<sup>1</sup>

Kemunculan awal dari sistem perdagangan bebas inipun awalnya diperkenalkan oleh Adam Smith yang mengkritik sistem perdagangan saat itu yang lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah dalam menentukan kepentingan – kepentingan dalam melakukan perdagangan. Adam Smith berasumsi bahwa

<sup>1</sup> A.F.K Organski, 1968, *World Politics (Second Edition)*, Random house: United States. Halaman 155

seharusnya sistem pasar global inipun harus terbebas dari campur tangan para pemerintah, karena jika pemerintah ikut dalam menentukan kebijakan dalam sistem tersebut sering kali mengakibatkan suatu tindakan kolusi antara pemerintah dan para pengusaha.<sup>2</sup>

Keadaan sistem pasar global ini pada awalnya memiliki titik terang pada saat dibentuknya GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) pada tahun 1947. GATT diresmikan pada tahun 1948 yang saat itu diresmikan di Geneva, Swiss.<sup>3</sup> Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan antar anggota GATT, tepat pada tanggal 1 Januari 1995 GATT berubah nama menjadi WTO atau yang saat ini dikenal sebagai *World Trade Organizations*. Dalam perubahan nama ini ada beberapa hal yang juga berubah dari kebijakan awal yang dibentuk saat GATT yaitu hanya membahas tentang perdagangan suatu barang, dan hal yang ditambahkan pada saat berubah menjadi WTO yaitu mereka juga membahas tentang regulasi perdagangan jasa dan juga kekayaan intelektual.

Tiongkok menjadi salah satu negara dari 23 negara yang ikut meratifikasi GATT pada saat pertama kali dibentuk pada tahun 1947. Lalu Tiongkok keluar dari GATT pada tahun 1949 dari Tiongkok baru bergabung kembali dengan WTO pada tahun 2001.<sup>4</sup> Setelah bergabung dengan WTO, Tiongkok mulai melakukan revolusi dibidang ekonominya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kerjasama – kerjasama dalam bidang ekonomi yang diikuti oleh Tiongkok baik itu kerjasama regional atau intra regional. Setelah melakukan kerjasama dibidang ekonomi , Tiongkok muncul menjadi suatu kekuatan baru yang dapat menyaingi kekuatan

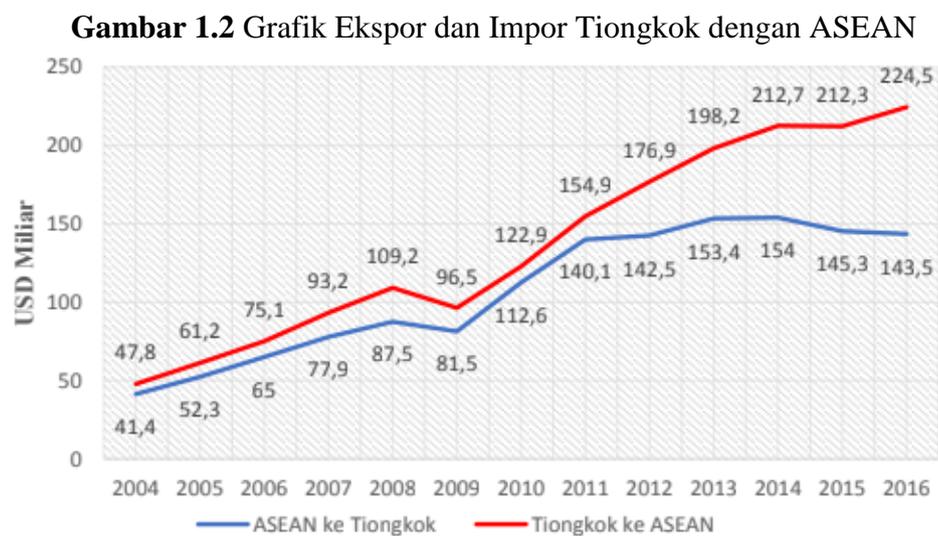
---

<sup>2</sup> Walter Carlnaes, Thomas Risse, and Beth A Simmons, 2004, *Handbook of International Relations*, London: SAGE Publications. Halaman 932

<sup>3</sup> WTO, “*History of Trade*”, ([www.wto.org/english/thewto\\_e/history\\_e/history\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/history_e/history_e.htm)), diakses pada 20 Oktober 2018.

<sup>44</sup> ibid

negara – negara yang sudah maju lebih awal dari Tiongkok seperti negara Amerika Serikat dan Jepang. Dibawah ini terdapat data angka ekspor dan impor Tiongkok dengan ASEAN yang diketahui sebagai sumber kekuatan baru dari Tiongkok.



Sumber : [www.wto.org](http://www.wto.org)

RCEP merupakan salah satu bentuk kerjasama perdagangan bebas antara negara Anggota ASEAN dan enam negara lainnya yaitu Tiongkok, Jepang, India, Korea Selatan, Australia dan juga Selandia baru. RCEP resmi diperkenalkan pada *21<sup>st</sup> ASEAN Summit and Related Summits* di Phnom Penh, Kamboja pada November 2012.<sup>5</sup> Pertemuan pertama setelah diperkenalkan, diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 2013. Pertemuan yang diwakilkan oleh masing – masing utusan negara anggota RCEP saat itu yang bertujuan untuk saling bernegosiasi antara negara anggota RCEP, didalam pertemuan yang pertama itu dibentuk lah tiga kelompok kerja dalam RCEP ini.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> ASEAN, “*Regional Comprehensive Economic Partnership*”, ([asean.org/?static\\_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership](http://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership)), diakses pada 20 Oktober 2018.

<sup>6</sup> Ibid, 20 Oktober 2018.

A. Kelompok kerja *Trade in Goods*

B. Kelompok kerja *Trade in Services*

C. Kelompok kerja *Investment*

Pada tahun 2013 sampai tahun 2018, RCEP sudah melakukan pertemuan sebanyak delapan kali. Berdasarkan delapan pertemuan itu, RCEP sudah membentuk beberapa kesepakatan yaitu diantaranya tentang perdagangan barang antara negara anggota yang telah menyepakati bahwa RCEP akan bertujuan secara progresif dalam menghilangkan hambatan tariff dan non-tariff pada semua perdagangan yang substansi semua jenis barang, kesepakatan lainnya yaitu mengenai perdagangan jasa bahwa RCEP akan secara komprehensif dan berkualitas tinggi dan akan mencakup keseluruhan substansi dalam menghilangkan pembatasan ataupun tindakan diskriminasi yang berhubungan dalam perdagangan jasa antara negara anggota RCEP, kesepakatan selanjutnya yaitu mengenai tentang kelompok kerja investasi, RCEP akan bertujuan menciptakan lingkungan investasi yang secara liberal, fasilitatif dan juga kompetitif diseluruh wilayah masing – masing negara anggota, dan negosiasi untuk investasi di bawah naungan RCEP ini memiliki empat pilar yaitu promosi, perlindungan, fasilitasi dan liberalisasi, dan kesepakatan yang terakhir yaitu RCEP akan memasukan mekanisme dalam penyelesaian sengketa antara anggota RCEP yang akan memberikan solusi secara efektif, efisien dan juga transparan.

Adanya indikasi lain yang membuat Tiongkok memiliki kepentingan lebih dalam RCEP ialah ada beberapa kerjasama perdagangan antar negara seluruh regional yang tidak diikuti oleh Tiongkok, salah satunya yaitu *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Kemudian terdapat peningkatan interaksi dibidang ekonomi

salah satunya kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh Tiongkok dengan negara anggota ASEAN yang mengalami peningkatan sejak awal RCEP ini diperkenalkan dan peningkatan inipun mengindikasikan kepentingan lain yang dimiliki oleh Tiongkok.

Terdapat suatu kesenjangan dalam kerjasama perdagangan ini. Pertanyaan tentang mengapa Tiongkok lebih tertarik untuk menginisiasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* dibandingkan ikut bergabung ke dalam berbagai kerjasama perdagangan bebas yang sudah terbentuk sebelumnya, menarik untuk diteliti. Selain itu kepentingan apa sajakah yang dimiliki Tiongkok dalam menginisiasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* juga menarik untuk dikaji lebih lanjut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Tiongkok sebelumnya sudah memiliki beberapa bentuk kerjasama perdagangan dengan negara – negara anggota RCEP dan Tiongkok pun lebih memilih untuk menginisiasi kerjasama perdagangan baru lagi yaitu, RCEP dari pada memperkuat kerjasamanya yang sudah dibentuk oleh Tiongkok sebelumnya.

Hal inipun memunculkan pertanyaan tentang kepentingan apakah yang mempengaruhi Tiongkok dalam menginisiasi RCEP. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : *Apa sajakah kepentingan yang ingin dicapai Tiongkok melalui kerjasama RCEP ?*

Pertanyaan ini penting untuk diteliti agar dapat memberikan perspektif bagi seluruh negara anggota RCEP dalam mengambil kebijakan perdagangannya, khususnya untuk Indonesia agar dapat memberikan sedikit gambaran dalam pengambilan kebijakan kerjasama perdagangannya sehingga terhindar dari kepentingan Tiongkok yang dapat berdampak buruk bagi Indonesia.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dibentuk untuk menjadi alur atau arahan dalam analisis yang akan disajikan dipenelitian ini. Tujuan penelitannya ialah untuk

1. Mendekripsikan kebijakan luar negeri Tiongkok dalam kerjasama perdagangannya
2. Menjelaskan apa saja kepentingan yang ingin dicapai Tiongkok melalui kerjasama RCEP
3. Menganalisis faktor – faktor lain yang membentuk kepentingan Tiongkok dalam RCEP

### **1.4. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Keilmuan

Dalam bidang keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau sumber ilmu tentang bagaimana kebijakan luar negeri Tiongkok dibangun sesuai dengan kepentingan yang mereka miliki dalam kerjasama RCEP, baik itu kepentingan ekonomi ataupun politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan di kajian Hubungan Internasional terkait bidang kerjasama internasional.

## 2. Manfaat Praktis

Untuk bidang praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh negara anggota RCEP dalam membentuk kebijakan luar negeri mereka di bidang kerjasama perdagangan, agar kebijakan tersebut dapat membuahkan keuntungan baik itu ekonomi atau pun keuntungan politik. khususnya bagi Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menyesuaikan kebijakan luar negeri dalam bidang perdagangan agar terhindar dari dampak negatif seperti eksploitasi pasar yang sering dilakukan oleh Tiongkok.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini diawali tentang beberapa penelitian terdahulu, yang membahas topik atau kajian tentang kepentingan Tiongkok dalam kerjasama regional. Bagian ini diawali dengan penjelasan dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu inipun juga digunakan untuk mengetahui perbedaan dan keunikan dari penelitian ini.

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

**Karya ilmiah yang pertama** yaitu ditulis oleh Shamsul Khan dan Lei Yu, dengan judul “*Evolving China-ASEAN Relations and CAFTA: Chinese Perspectives on China Initiatives in Relation to ASEAN Plus 1*”. Latar belakang dari penelitian ini ialah mengenai perjanjian perdagangan antara Tiongkok dengan ASEAN. Perjanjian ini diinisiasi oleh Tiongkok. Dalam penjelasan tulisan ini, Tiongkok memiliki alasan dalam menginisiasi kerjasama ini. Hal ini dikarenakan ASEAN menjadi salah satu wilayah regional yang dominan dengan populasi sebesar 1,9 juta jiwa dan memiliki angka GDP hampir 8 trilyun dollar Amerika.<sup>7</sup>

Dalam penelitiannya ini, Shamsul Khan dan Lei Yu menggunakan data sekunder yang banyak diambil dari buku, jurnal ataupun dokumen – dokumen dari

---

<sup>7</sup> Shamsul Khan and Lei Yu, 2013, *Evolving China-ASEAN Relations and CAFTA: Chinese Perspectives on China Initiatives in Relation to ASEAN Plus 1*. Australia: University of South Australia. Vol 13, no.10. halaman 81-107.

perjanjian. Ada beberapa konsep yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu *Intra-regional cooperation*, *Foreign Policy*, dan *Economic Diplomacy*.

Penelitian ini menganalisis peluang apa saja yang akan didapatkan oleh Tiongkok dalam kerjasama perdagangan dengan ASEAN ini atau disebut CAFTA (*China-ASEAN Free Trade Area*). Shamsul Khan dan Lei Yu mengatakan bahwa dalam kerjasama ini Tiongkok bukan hanya memiliki kepentingan dalam kerjasama ekonomi dan menjalin hubungan dengan negara besar di ASEAN saja. Shamsul Khan dan Lei Yu menganalisis bahwa ada kepentingan geopolitik yang dimiliki oleh Tiongkok dalam CAFTA ini. Salah satunya yaitu membuat mata uang Tiongkok menjadi lebih internasional dan dapat menyaingi mata uang besar seperti mata uang dollar Amerika ataupun mata uang Eropa.

Relevansi dari penelitian Shamsul Khan dan Lei Yu dengan penelitian yang akan saya lakukan ialah adanya suatu persamaan dalam pembahasan tentang peluang dan juga kepentingan yang dimiliki oleh Tiongkok dalam menjalin kerjasama perdagangan dengan ASEAN atau yang bernama CAFTA. Adapun yang membedakan penelitian Shamsul Khan dan Lei Yu dengan penelitian saya ialah variabel – variabel penelitian yang dapat dilihat dari penelitian sebelumnya menggunakan variabel Uni Eropa dan juga negara besar di ASEAN saja dalam menganalisis kepentingan geopolitik yang dimiliki oleh Tiongkok.

**Karya ilmiah yang kedua** yaitu berjudul “*The Forum on China – Africa Cooperation, Ideas and Aid: National Interest(s) or Strategic Partnership?*” yang ditulis oleh Ambrose Du Plessis.<sup>8</sup> Latar belakang dari dilakukannya penelitian ini ialah adanya suatu kerjasama antara Tiongkok dan juga Afrika yang membentuk

---

<sup>8</sup> Ambrose Du Plessis, 2014, *The Forum on China – Africa Cooperation, Ideas and Aid: National Interest(s) or Strategic Partnership?*. London: SAGE Publication. Vol. 6, no.2. halaman 113-130.

suatu forum yang bernama FOCAC (*Forum on China-Africa Cooperation*). Dalam kerjasama FOCAC inipun timbul suatu kebijakan Tiongkok yang menimbulkan pertanyaan apakah ada kepentingan lain Tiongkok dalam memberikan bantuan pembangunan bagi Afrika.

Dalam penelitiannya, Ambrose Du Plessis menggunakan data – data sekunder yang menjadi referensi dan didapatkan dari buku, jurnal dan juga dokumen – dokumen penting terkait kerjasama FOCAC. Pada penelitian Ambrose menggunakan beberapa konsep dan teori, seperti *National Interest*, *Strategic Partnership* dan juga *Foreign Aid*.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana awal terbentuknya kerjasama antara Tiongkok dan Afrika. Kerjasama antara Tiongkok dan Afrika bukanlah suatu hal baru. Kerjasama ini sudah berlangsung sejak pada awal masa perang dingin dimulai. Pada saat itupun ada suatu kesamaan nasib antara Tiongkok dan juga negara – negara di Afrika, yaitu sama – sama merasakan penindasan dari negara – negara Barat saat itu. Kesamaan itulah yang menjadi alasan awal terbentuk kerjasama antara Tiongkok dan Afrika. Setelah perang dingin berakhir barulah Tiongkok semakin mengembangkan kerjasamanya dengan Afrika dan membentuk suatu forum yaitu FOCAC. Disaat berjalannya FOCAC, Tiongkok merancang ide baru yang mengusung suatu bentuk *Strategic Partnership* yang berisikan tentang bantuan pembangunan baik itu dalam bentuk hibah, pinjaman, dan hutang. Munculnya ide inipun membuat suatu pertanyaan untuk membuat suatu analisis dari ide yang diinisiasikan oleh Tiongkok tersebut. Penelitian ini memberikan suatu sudut pandang untuk menjadi kaca mata dalam menganalisis ide tersebut.

Ada dua sudut pandang yang diberikan dalam penelitian ini, yaitu negatif dan juga positif. Penglihatan positif itupun didapatkan dari dokumen – dokumen pidato para pejabat yang berasal dari Tiongkok, yang berisikan tentang keuntungan yang akan didapatkan oleh Afrika dalam kerjasama tersebut. Berdasarkan sisi negatif itupun dilihat dari adanya kepentingan lain atau kepentingan geopolitik yang dimiliki oleh Tiongkok. Hal ini diungkapkan bahwa Afrika dijadikan alat untuk Tiongkok meminimalisir power negara – negara Barat. Hal itupun dapat dilihat bahwa negara – negara di Afrika banyak menjadi negara kolonialisasi beberapa negara Barat. Ada beberapa alasan mengapa negara – negara Afrika ikut dalam meratifikasi kerjasama ini ialah karena merasa lebih banyak mendapatkan keuntungan dan merasa bahwa kerjasama ini merupakan suatu bentuk *Positive sum-game*, hal itupun dapat membuat negara – negara Afrika lepas tangan dengan negara – negara Barat yang diketahui sangat dominan salah satunya dalam Pan Afrikanisme.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan ialah terletak pada analisis kepentingan lain seperti kepentingan geopolitik dari kerjasama yang dilakukan oleh Tiongkok. Penelitian inipun memiliki beberapa persamaan dengan karya ilmiah yang pertama, yaitu terletak pada kepentingan geopolitik yang berhubungan dengan negara – negara Barat atau juga Uni Eropa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah terlihat dari variabel penelitian yang hampir sama dengan karya ilmiah yang pertama.

**Karya ilmiah yang ketiga** ditulis oleh Xiangshuo Yin dengan judul *”The Impact of The China-ASEAN Free Trade Agreement on Regional Trade”*. Penelitian ini memiliki latar belakang yaitu keuntungan apa sajakah yang

didapatkan oleh masing – masing anggota kerjasama ini baik itu dari sisi Tiongkok dan juga dari negara – negara ASEAN. Penelitian ini menganalisis tentang keuntungan yang didapatkan oleh semua pihak yang terlibat.<sup>9</sup>

Penelitian ini menggunakan perspektif liberal institusionalisme dalam melihat kerjasama *China-ASEAN Free Trade Agreement on Regional Trade*. Pada penelitian ini menggunakan konsep perdagangan bebas, yang menjadi acuan dalam menganalisis dan mencari keuntungan apa saja yang didapatkan oleh semua pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam menjadi acuan penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber kredibel seperti buku, jurnal dan juga dokumen – dokumen dari perjanjian tersebut.

Penelitian yang ditulis oleh Xiangshuo Yin ini diawali dari bagaimana sejarah awal mula Tiongkok membuka atau menggunakan sistem pasar bebas dan juga membahas tentang bagaimana perkembangan kerjasama perdagangan regional berkembang, khususnya ASEAN yang dikenal dengan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*). Dalam penelitian ini, penulis lebih berkonsentrasi dengan penjelasan bahwa perdagangan bebas dapat membawa banyak keuntungan yang salah satunya dalam bidang ekonomi pembangunan dan juga peningkatan teknologi. Penelitian ini terdiri dari beberapa pembahasan tentang pengaruh dan keuntungan apa saja yang didapatkan dari kerjasama. Bagian pertama membahas tentang sejarah perkembangan Tiongkok dalam perkembangan ekonomi dan perkembangan perdagangan. Bagian kedua penelitian ini membahas tentang sejarah Tiongkok di perdagangan Internasional dan perdagangan Regional. Bagian ketiga membahas tentang dampak yang didapatkan oleh Tiongkok dan

---

<sup>9</sup> Xiangshuo Yin, 2004, *The Impact of The China-ASEAN Free Trade Agreement on Regional Trade*. Institut For National Security Strategy. Vol.18, no.2. halaman 311-339.

juga ASEAN dari CAFTA. Pada bagian terakhir membahas tentang dampak ekonomi dari masing – masing anggota regional ini.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan ialah terletak pada pembahasan tentang bagaimana kerjasama perdagangan bebas itu saling memberikan keuntungan bagi masing – masing negara anggota. Hal itu dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian yang akan saya lakukan nanti. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan nanti terletak pada isu dan juga unit analisisnya. Unit analisis penelitian ini hanya menggunakan kepentingan ekonomi. Sementara penelitian yang akan saya lakukan nanti akan menambahkan unit analisis lain, seperti kepentingan politik ataupun kepentingan lainnya.

**Karya ilmiah yang keempat** yaitu berjudul ”*China’s Cross-Regional FTA Initiatives: Towards Comprehensive National Power*”. Karya ilmiah ini ditulis oleh Stephen Hoadley dan Jian Yang. Penelitian ini di latar belakang oleh perubahan orientasi kebijakan perdagangan Tiongkok yang awalnya menganut privatisasi pasar berubah menjadi lebih menganut sistem perdagangan global dan juga lebih kefokus ke dalam bidang agrikultur dan sektor industri. Perubahan inipun dapat ditandai dari banyaknya kerjasama – kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh Tiongkok bersama dengan negara ataupun wilayah regional tetangga.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan beberapa teori serta konsep seperti *National Interest*, *Strategic Partnership*, dan *Foreign Policy*. Data yang digunakan dalam

---

<sup>10</sup> Stephen Hoadley and Jian Yang, 2007, *China’s Cross-Regional FTA Initiatives: Towards Comprehensive National Power*. Pacific Affairs: University of British Columbia. Vol.80, no.2. halaman 327-348

penelitian mengacu pada data sekunder yang diambil dari berbagai sumber kredibel seperti buku, jurnal, atau juga dokumen – dokumen dari setiap perjanjian.

Penelitian ini diawali dengan membahas tentang sejarah kerjasama perdagangan yang pernah dilakukan oleh Tiongkok. Di awal penelitian, penulis juga menjelaskan bahwa Tiongkok memiliki banyak tujuan dan juga kepentingan di luar kepentingan ekonomi dalam setiap bentuk kerjasama perdagangan yang mereka lakukan. Selain memiliki kepentingan ekonomi, Tiongkok juga memiliki tujuan dan juga kepentingan lainnya dalam setiap kerjasama seperti peningkatan power yang lebih komprehensif. Hal itu tentunya juga membawa kepentingan politik dan keamanan yang mereka anggap penting atau vital. Penelitian ini juga menjelaskan tentang bagaimana Tiongkok membentuk setiap kerjasama perdagangannya berdasarkan kepentingan yang didapatkan dari negara tersebut.

Dalam kesimpulannya, penulis menyebutkan bahwa semua kerjasama perdagangan yang dilakukan untuk menambahkan kekuatan keamanan ekonomi Tiongkok. Penulis juga menjelaskan bahwa kerjasama perdagangan digunakan untuk mempengaruhi dan juga menambah kemampuan dalam persaingan dengan negara – negara super power lainnya, seperti Jepang dan Amerika Serikat.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan saya lakukan nanti. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana Tiongkok menyusun kebijakan perdagangan mereka dengan melakukan kerjasama perdagangan. Kerjasama perdagangan tersebut memiliki banyak kepentingan, seperti kepentingan di luar bidang ekonomi itu sendiri. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan atau referensi dalam penelitian yang akan dilakukan nanti. Dari seluruh penelitian terdahulu

yang sudah disebutkan diatas, terdapat beberapa ringkasan penting yang sudah di masukkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1.** Komparasi Penelitian Terdahulu

	<b>Shamsul Khan dan Lei Yu</b> “ <i>Evolving China-ASEAN Relations and CAFTA: Chinese Perspectives on China Initiatives in Relation to ASEAN Plus 1</i> ”	<b>Ambrose Du Plesis</b> “ <i>The Forum on China – Africa Cooperation, Ideas, and Aid: National Interest(s) or Strategic Partnership</i> ”	<b>Xiangshuo Yin</b> “ <i>The Impact of The China-ASEAN Free Trade Agreement on Regional Trade</i> ”	<b>Stephen Hoadley dan Jian Yang</b> “ <i>China’s Cross-Regional FTA Initiatives: Towards Comprehensive National Power</i> ”
<b>Metode</b>	Pendekatan: Kualitatif Sumber data: Sekunder Metode Data: Studi Literatur	Pendekatan: Kualitatif Sumber data: Sekunder Metode Data: Studi Literatur.	Pendekatan: Kualitatif Sumber data: Sekunder Metode Data: Studi Literatur.	Pendekatan: Kualitatif Sumber data: Sekunder Metode Data: Studi Literatur
<b>Objek Penelitian</b>	Analisis kerjasama perdagangan CAFTA	Analisis kepentingan nasional Tiongkok dalam FOCAC	Dampak dari CAFTA	Analisis Kepentingan Tiongkok dalam FTA
<b>Teori &amp; Konsep</b>	1. Kerjasama Regional 2. <i>Foreign Policy</i> 3. <i>Economic Diplomacy</i>	1. <i>National Interest</i> 2. <i>Strategic Partnership</i> 3. <i>Foreign Aid.</i>	Konsep Perdagangan bebas.	1. <i>National Interes</i> 2. <i>Strategic</i> 3. <i>Partnership, Foreign Policy</i>
<b>Kesimpulan</b>	Adanya kepentingan Geopolitik Dari kerjasama CAFTA	Masing – masing anggota saling mendapatkan keuntungan dan juga saling memiling kepentingan politik	Masing – masing Anggota perjanjian saling mendapatkan keuntungan ekonomi.	Setiap kerjasama yang dilakukan tiongkok memiliki kepentingan disegala bidang.

**Sumber:** hasil pengelolaan data peneliti terdahulu

Berdasarkan seluruh penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa persamaannya ialah penelitian yang dilandasi dengan kerjasama dibidang ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok. Adapun perbedaan

dari penelitian ini berada pada tujuan penelitian yang mencari kepentingan lain yang dimiliki oleh Tiongkok pada kerjasama RCEP.

Penelitian ini menarik karena saya akan mencoba untuk meneliti kepentingan apa sajakah yang dimiliki oleh Tiongkok dalam kerjasama RCEP yang mereka inisiasikan. Penelitian ini akan memakai berbagai faktor yang didapatkan dari berbagai sumber yang kredibel atau dari penelitian yang sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan suatu kesimpulan yang merangkum jawaban dari pertanyaan penelitian .

## **2.2. Landasan Teoritis**

Dalam meneliti kepentingan apa sajakah yang dimiliki oleh Tiongkok pada kerjasama RCEP diperlukan suatu landasan teoritis untuk membantu dalam menentukan logika berfikir. Dalam menyusun landasan teoritis, penelitian ini kembali meneruskan berdasarkan keempat penelitian terdahulu dalam meneliti kepentingan Tiongkok dalam satu kerjasama, sehingga penelitian ini menggunakan beberapa konsep serta teori yaitu diantaranya konsep kepentingan nasional yang digunakan sebagai landasan latar penelitian, konsep kerjasama internasional, teori ekonomi politik dan teori *power transition* yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan kerangka berfikir dan menjelaskan indikator dalam kepentingan yang dimiliki oleh Tiongkok.

### **2.2.1. Konsep Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional menurut asumsi dari Robert O. Keohane ialah suatu kondisi atau aktivitas suatu aktor internasional untuk menentukan kebijakan

yang akan mereka bentuk. Dalam terbentuknya kerjasama internasional terjadi beberapa perubahan khususnya setelah berakhirnya perang dunia kedua, yaitu adanya perubahan dari aktor kerjasama internasional yang lebih banyak dilakukan oleh negara – negara industri yang berkonsentrasi untuk bernegosiasi dalam bidang ekonomi. Robert O. Keohane menyebutkan bahwa kerjasama internasional tidak dapat dipisahkan dari berbagai kepentingan yang dimiliki oleh aktor – aktor yang terlibat. Kerjasama internasional juga memiliki dua kondisi seperti dilakukan untuk mencegah timbulnya situasi yang dapat memicu suatu keributan, dan juga kondisi kerjasama internasional dapat menimbulkan suatu situasi yang memicu terjadinya suatu keributan yang dikarenakan oleh adanya suatu kepentingan didalam suatu kerjasama internasional yang akan membawa suatu ancaman bagi aktor – aktor lainnya.<sup>11</sup>

Robert Angel dan Ramsey Muir juga berasumsi mengenai kerjasama internasional, yang menyebutkan bahwa kerjasama internasional muncul karena berkurangnya jarak dan perbedaan dari berbagai mekanisme yang sudah ada. Robert Angel dan Ramsey Muir juga menyebutkan bahwa kerjasama internasional bisa menjadi hal pendorong bagi meningkatnya interdependensi antar aktor internasional dan akan secara langsung berimbas pada perubahan politik dunia. Asumsi yang terakhir yaitu mereka bahwa pada pandangan Robert Angel dan Ramsey Muir, kerjasama internasional tidak dapat menyebabkan hilangnya konflik, melainkan akan menjadikan konflik – konflik dalam bentuk – bentuk yang baru.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Robert O. Keohane, 1984, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, New Jersey: Princenton University Press. Halaman 5 – 12.

<sup>12</sup> Walter Carlnaes, Thomas Risse, dan Beth A Simmonns, 2004, *Handbook of International Relations*, London: SAGE Publications. Halaman 495 - 496

Asumsi selanjutnya mengenai kerjasama internasional menurut yang dikatakan oleh Lauri Siitonen, sebagai suatu bentuk aktivitas interaksi sosial antar aktor internasional yang didalamnya ada suatu kepentingan untuk mencapai tujuan secara bersama – sama. Hal ini dilakukan dengan tanpa adanya suatu paksaan dari berbagai pihak. Didalam suatu bentuk kerjasama terdapat suatu kemungkinan terjadinya hubungan yang kurang rukun karena adanya bentuk perebutan kekuasaan secara halus dan tersembunyi diantara para aktor yang berkerjasama, dan sering kerjasama tersebut berjalan dengan sistem yang didominasi oleh suatu aktor diantara aktor lainnya. Jika dilihat dari hal ini, kerjasama internasional tidak dapat dilihat sebagai suatu hubungan yang hanya membawa suatu kerukunan melainkan dapat juga menimbulkan suatu konflik.<sup>13</sup>

Dalam sebuah buku literatur hubungan internasional ada sebuah asumsi mengenai kerjasama internasional dapat berkembang dan meningkat dikarenakan oleh keberadaan dari berbagai lembaga – lembaga internasional. Lembaga – lembaga internasional dapat mendorong negara – negara untuk berperilaku dengan cara yang lebih kooperatif. Kerjasama internasional juga dapat meningkatkan keberadaannya ketika adanya suatu sanksi atau suatu ancaman. Kerjasama internasional juga dapat terbentuk karena sikap dari berbagai aktor internasional dalam menanggapi aturan – aturan internasional yang sudah ada sebelumnya. dan dalam literatur ini, mengatakan bahwa kerjasamaa internasional dapat menyebabkan suatu konflik yang dikarenakan oleh keberadaan lembaga – lembaga internasional. Hal ini dikatakan karena disaat adanya tumpang tindih dari

---

<sup>13</sup> Lauri Siitonen, 1990, *Political Theories of Development Cooperation – A study of Theories of International Cooperation*, *Wider Working Papers* No. 86, Helsinki: World Institute for Development Economics Research of the United Nations University. Halaman 6-7

keberadaan lembaga yang sama, maka akan muncul suatu kerjasama untuk menjatuhkan lembaga yang baru terbentuk.<sup>14</sup>

Dalam kerjasama internasional terdapat dua bentuk kerjasama yaitu kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral ialah suatu aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua aktor internasional yang biasanya memiliki kepentingan yang berbeda namun tetap memiliki tujuan yang sama dan juga rasional. Sedangkan kerjasama multilateral ialah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh tiga atau lebih aktor internasional. Dalam kerjasama multilateral tidak jarang berbagai aktor – aktor yang terlibat sering membentuk suatu institusi atau organisasi dalam menjalankan kerjasama multilateral tersebut. Institusi atau organisasi yang dibentuk biasanya memiliki suatu tujuan yang sama antar anggotanya atau juga dari kedekatan wilayah geografis antar anggota.

Ada beberapa literatur dari hubungan internasional yang menjelaskan tentang sifat dari suatu kerjasama internasional bagi seluruh aktor yang berada didalamnya. yang pertama yaitu sifat *Positive sum game* yang diasumsikan oleh Robert Jackson dan George Sorensen sebagai suatu keadaan didalam suatu kerjasama memiliki suatu keuntungan timbal balik antar aktor kerjasama tersebut. Walaupun keuntungan yang diberikan dari kerjasama tersebut tidak secara merata melainkan ada aktor yang lebih dominan dalam mendapatkan keuntungan, namun hal itu masih dianggap suatu hal yang rasional.<sup>15</sup> Sifat yang kedua diasumsikan oleh R. Viotti dan Mark V. Kauppi yaitu *Zero sum game*, sifat ini diasumsikan bahwa dalam suatu kerjasama akan terdapat suatu keuntungan yang didapatkan

---

<sup>14</sup> Walter Carlnaes, Thomas Risse, dan Beth A Simmonns, 2004, *Handbook of International Relations*, London: SAGE Publications. Halaman 408 - 411

<sup>15</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition*. Oxford: Oxford University Press. Halaman 165-166

oleh satu aktor dan keuntungan tersebut akan mengakibatkan suatu kerugian bagi aktor lainnya. Hal ini dianggap lebih memberatkan bagi suatu pihak yang berkerjasama.<sup>16</sup>

Berdasarkan berbagai konsep mengenai kerjasama internasional yang sudah dijelaskan di atas, terdapat beberapa penjelasan yang hampir sama yaitu dari berbagai konsep di atas mengatakan bahwa dalam suatu bentuk kerjasama tidak dapat terlepas dari keberadaan kepentingan – kepentingan domestik yang dimiliki oleh aktor internasional yang berkerja sama. Berdasarkan beberapa konsep di atas juga menyebutkan bahwa kerjasama internasional tidak hanya terbentuk dengan tujuan untuk membuat hubungan yang harmonis tetapi juga dapat terbentuk untuk membuat suatu keadaan yang kurang rukun antar aktor internasional. Kerjasama internasional juga tidak selamanya menjunjung sifat keadilan dan kerjasama internasional juga tidak selamanya terbentuk dalam kondisi damai tetapi juga dapat terbentuk dalam kondisi konflik.

Dalam berbagai literatur di atas yang menjelaskan tentang kerjasama internasional banyak dilakukan dalam bidang ekonomi politik. Hal ini dapat dilihat bahwa banyaknya kepentingan antar aktor dalam kerjasama internasional yang lebih mengacu pada peningkatan ekonomi domestik saja. Salah satu kerjasama yang banyak terbentuk ialah dalam perjanjian perdagangan bebas. Seperti yang dikatakan oleh Adam Smith bahwa perdagangan bebas akan banyak menghasilkan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Konsep ini akan dikaitkan menjadi landasan pemahaman pendukung dalam menganalisis kerjasama RCEP yang diinisiasikan oleh Tiongkok.

---

<sup>16</sup> Paul R. Viotti and Mark. V Kauppi. 2012. *International Relations Theory: Fifth Edition*. Glenview: Pearson Education, Inc. Halaman 54-55

### 2.2.2. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional menurut Robert Jackson dan Georg Sorensen ialah cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk menetapkan dan menjalankan kepentingan yang berada di kebijakan negara tersebut. Kepentingan nasional juga merupakan petunjuk dasar bagi negara untuk membuat kebijakan luar negeri yang merupakan hasil dari pemikiran moral yang harus dipertahankan dan dimajukan oleh para pemimpin negara. Kepentingan nasional terlihat bergerak seperti sinyal otomatis yang memerintahkan para pemimpin negara kapan dan kemana harus bergerak. Kepentingan nasional dapat dikatakan berhasil pada saat kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh para pemimpin tidak banyak diketahui atau tidak ada yang menyangka bahwa ada suatu kepentingan lain dari kebijakan yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Hal ini tergantung pada kelihaihan dan kebijaksanaan keputusan yang diambil.<sup>17</sup>

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional ialah suatu tujuan yang mendasar dan menjadi penentu akhir yang memandu dari pembuatan keputusan suatu negara dalam membentuk kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional memiliki tipikal yang sangat umum yaitu merupakan kebutuhan paling penting dibagian suatu negara seperti kebutuhan keamanan teritorial, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Jack dan Roy juga berasumsi bahwa tidak ada kepentingan tunggal yang mendominasi fungsi pembuatan kebijakan dari suatu negara. Jack dan Roy mengatakan bahwa ada beberapa teknik yang digunakan oleh suatu negara untuk mengaplikasikan kepentingan nasionalnya, yaitu dengan

---

<sup>17</sup> Robert Jackson and Georg Sorensen, 2013, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches (Fifth Edition)*, Oxford University Press. Halaman 140-141

teknik diplomasi, bergabung dengan organisasi regional atau lembaga global seperti Persatuan Bangsa – Bangsa dan lembaga – lembaganya.<sup>18</sup>

Asumsi selanjutnya dikatakan oleh Joseph Frankel yang mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional ialah sebagai alat analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan atau mengevaluasi sumber suatu kebijakan luar negeri suatu negara. konsep inipun juga dapat digunakan sebagai tindakan politik yang berfungsi untuk menjadi sarana pembenaran untuk mengusulkan kebijakan. Konsep ini merujuk pada sesuatu yang terbaik untuk masyarakat nasional. Setiap kebijakan yang dikeluarkan bertujuan untuk dapat menguntungkan bagi berbagai pihak.<sup>19</sup>

Konsep kepentingan nasional ini akan digunakan untuk memetakan dan mendeskripsikan kepentingan – kepentingan nasional yang dimiliki oleh Tiongkok dalam bentuk kerjasama yang diinisiasikan Tiongkok, yaitu RCEP.

### **2.2.3. Teori Ekonomi Politik**

Robert Gilpin berasumsi mengenai ekonomi politik ialah suatu kondisi adanya kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh urusan atau kepentingan lain seperti sosial, politik, lingkungan dan juga budaya. Adanya kepentingan – kepentingan itulah yang mempengaruhi tujuan dari suatu kegiatan ekonomi dan juga menentukan batas – batas kegiatan ekonomi yang harus berfungsi. Ekonomi politik juga merupakan suatu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu aktor negara atau non-negara dengan melihat dari berbagai faktor seperti sosial, politik atau psikologi.

---

<sup>18</sup> Jack C. Plano and Roy Olton, 1988, *The International Relations Dictionary(Fourth Edition)*, Western Michigan University. Halaman 10-11

<sup>19</sup> Joseph Frankel, 1970, “*Key Concept in Political Science, National Interest*”, Pall Mall Press: London. Halaman 15-16

Robert Gilpin juga berasumsi bahwa ekonomi politik lebih cenderung tertarik pada bagaimana pembagian keuntungan dari kegiatan pasar internasional dapat di distribusikan secara merata diantara semua aktor ekonomi tersebut. Ekonomi politik dapat memberikan suatu pertimbangan bagi suatu aktor dalam melakukan kegiatan ekonomi, apakah kegiatan tersebut dapat berdampak pada suatu kekuasaan atau nilai – nilai politik yang sudah ada. Ekonomi politik juga dapat membuat suatu negara untuk melakukan kegiatan ekonomi internasional yang dapat menjaga atau bahkan menambah kekuatan negara tersebut agar mendapatkan kebebasan dalam bertindak. Ekonomi politik juga dapat membuat suatu negara memanipulasi kekuatan pasar bebas untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh mereka atas negara – negara lainnya.<sup>20</sup>

Dalam buku yang ditulis oleh Robert O. Keohane menjelaskan bahwa ekonomi politik ialah suatu interaksi antar aktor internasional dalam suatu hubungan atau kerjasama yang bertujuan untuk mengejar kekayaan atau kekuasaan. Keohane juga menjelaskan bahwa ekonomi politik dapat dilihat ketika suatu aktor internasional menggunakan kekuasaannya untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan dijalankan secara politik. Ekonomi politik juga memiliki suatu sumber daya non-ekonomi yang dapat menjadi faktor penting yaitu status atau kekuasaan. Keohane juga berasumsi bahwa ekonomi politik didasari dari kepentingan tertentu yang dimiliki oleh suatu aktor internasional dan kepentingan itu terbentuk oleh keinginan untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, atau juga nilai – nilai yang lainnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Robert Gilpin, 2001, *Global Political economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton University Press: New Jersey. Halaman 74-77

<sup>21</sup>Robert O. Keohane, 1984, *After Hegemony Cooperation and Discourd In the World Political Economy*. Princeton University Press: New Jersey. Halaman 18-22

Ekonomi politik diartikan oleh Robert A. Dahl dan Charles E. Lindblom sebagai suatu bentuk aktivitas dari suatu negara dibidang ekonomi yang terbentuk atas kepentingan lain yang bersifat non-ekonomi seperti sosial, budaya, politik dan lain – lain. Ekonomi politik juga dapat dilihat dari suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara dan jika kebijakan tersebut direncanakan dengan baik, maka akan memiliki dampak yang baik bagi negara lain dan negara tersebut, hal ini juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi negara lainnya.<sup>22</sup>

Dalam sebuah buku literatur hubungan internasional, ekonomi politik didefinisikan sebagai bentuk kegiatan suatu aktor baik itu negara atau non-negara yang menggabungkan bidang ekonomi internasional dan ilmu politik untuk mencari perubahan bagi ekonomi politik nasional yang mereka miliki. Aktivitas ini dapat berupa aliansi atau kerjasama antar aktor internasional dan aktor tersebut sering menggunakan peran negara untuk menjalankan kepentingan nasionalnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan semua penjelasan dan juga asumsi mengenai ekonomi politik yang didapatkan dari beberapa literatur, ada suatu penjelasan yang hampir memiliki kesamaan antara satu literatur dengan literatur lainnya, yaitu ekonomi politik ialah suatu alat yang digunakan oleh aktor internasional baik itu negara negara atau non-negara dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang didalamnya memiliki berbagai kepentingan lain yang bersifat non-ekonomi. Ekonomi politik memiliki suatu perbedaan yang sangat mendasar dengan teori ekonomi klasik, yaitu ekonomi klasik hanya memiliki tujuan atau kepentingan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan ekonomi atau keuntungan finansial sebanyak –

---

<sup>22</sup> Robert A. Dahl and Charles E. Lindblom, 1963, *Politics, Economics, and Welfare (Planning and Politico-Economic System Resolved into Basic Social Processes)*. Harper & Row Publishers: New York. Halaman 3-5

<sup>23</sup> Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A Simmonns, 2004, *Handbook of International Relations*, London: SAGE Publications. Halaman 966-967

banyaknya. Namun karena banyak para ilmuwan meneliti bahwa teori ekonomi klasik hanyalah sebuah teori yang tidak memberikan keuntungan secara konsisten, lantas muncul ekonomi politik yang mulai terlihat pada masa perang dingin dan sampai saat ini. Ekonomi politik sendiripun banyak digunakan oleh negara – negara yang memang memiliki keunggulan dibidang industri. Selanjutnya ekonomi politik diketahui dapat digunakan untuk mengubah hegemoni pasar bebas disuatu kawasan yang dikuasai oleh suatu negara menjadi dikuasai oleh negara lainnya. Teori ekonomi politik ini akan dijadikan landasan berfikir untuk memetakan kebijakan yang dimiliki oleh Tiongkok apakah ada unsur ekonomi politik khususnya dalam seluruh aktivitas yang dilakukan Tiongkok dalam kerjasama RCEP.

#### **2.2.4. *Power Transition Theory***

*Power Transition Theory* didefinisikan oleh Organski adalah suatu pergerakan atau perubahan dibidang distribusi kekuasaan dengan upaya memaksimalkan beberapa faktor penentu seperti ukuran populasi, efisiensi politik, angka persenjataan atau pembangunan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena pada era saat ini, adanya ketidak stabilan pada tatanan internasional yang membuat perubahan dapat terjadi dengan cepat berdasarkan angka populasi, organisasi politik dan kekuatan negara – negara industri. *Power Transition Theory* Didasari oleh asumsi yang mengatakan bahwa masing – masing negara akan memiliki kekuatan jika menang dalam perang atau membuat aliansi baru. Namun asumsi ini sudah berubah di era modern, munculnya faktor – faktor lain yang merealisasikan *Power Transition Theory* ini seperti melakukan revolusi industri secara besar – besaran. Hal inipun sudah dilakukan oleh beberapa negara yang

dianggap berhasil menggeser kekuatan suatu negara yang sudah sejak lama melakukan revolusi industri.<sup>24</sup>

Menurut Organski, industrialisasi saat ini berkembang menjadi faktor penting dalam hal kekuatan nasional. Hal ini dikarenakan bahwa industrialisasi dapat meningkatkan angka populasi masyarakat, memperoleh kekayaan finansial serta akan berpengaruh pada efisiensi pemerintahan. Organski juga mengatakan bahwa dalam pergeseran suatu negara untuk melakukan transisi kekuasaan memiliki beberapa tahapan yang juga dapat menjadi bahan analisis sudah dimana pergerakan suatu negara, tahapannya yaitu<sup>25</sup>

1. *Potential Power*
2. *Transitional growth in power*
3. *Power Maturity*

Tahapan yang pertama ialah tahapan dimana suatu negara itu bukan negara industri dan biasanya memiliki fokus dibidang perkebunan. Dalam tahapan ini diisi oleh negara – negara yang memang banyak sekali memiliki kekurangan baik itu pembangunan ekonominya, kualitas sumber daya manusia bahkan didalam pemerintahan di negara itu sendiri. Tahapan yang kedua diisi oleh negara – negara yang baru saja melakukan pra-industrialisasi, negara yang berada ditahapan ini biasanya negara berkembang yang memiliki angka pembangunan ekonomi yang cukup baik. Tahapan yang ketiga diisi oleh negara – negara yang sudah lama melakukan revolusi industri dan negara – negara tersebut sudah memiliki angka ekonomi yang tinggi yang dihasilkan dari bidang industri yang mereka miliki.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>A. F. K. Organski, 1968, *World Politics*. Random House, New York. Halaman 338-339.

<sup>25</sup> Ibid. halaman 340-341

<sup>26</sup> Ibid. halaman 342-343.

Asumsi selanjutnya yaitu dari Margit Bussman dan John R. Oneal yang mengatakan bahwa *Power Transition Theory* muncul karena adanya kemungkinan terjadinya perang ketika negara yang terkemuka ditantang oleh negara pesaing yang tumbuh dengan cepat dan tidak puas dengan adanya hegemoni yang hanya menguntungkan satu negara itu saja. Negara pesaing yang tidak puas dengan kondisi hegemoni seperti itu biasanya melakukan aliansi dengan negara lain agar memiliki kekuatan yang dominan. Margit dan John juga mengatakan bahwa dalam terjadinya transisi kekuatan dapat menggunakan beberapa model seperti sengketa militer, hasil dari perang atau pertumbuhan ekonomi, dan dengan menggunakan beberapa model itulah, suatu negara yang tidak puas dengan negara yang dominan, berusaha untuk mengambil alih kekuasaan agar dapat berkontribusi dalam membuat peraturan – peraturan internasional.<sup>27</sup>

*Power Transition Theory* menurut Douglas Lemke ialah suatu teori yang berfokus pada interaksi negara besar yang mengimplikasikan untuk adanya perubahan struktur kekuasaan sistem internasional. Douglas Lemke juga mengatakan bahwa teori ini bukanlah teori realis murni. Hal ini dapat dilihat dari interaksi yang digunakan biasanya terjadi dengan cara diplomasi, ekonomi ataupun militer. Douglas Lemke juga berpendapat bahwa transisi kekuasaan ini terjadi karena negara – negara yang dominan memiliki peran yang sangat besar dalam membuat aturan internasional dalam bidang politik, ekonomi atau militer, karena merasa adanya ketidakadilan atas pembagian keuntungan yang dihasilkan dari aturan – aturan tersebut maka munculah negara - negara yang tidak suka dengan ketidakadilan tersebut. Selanjutnya yang tidak suka itu berusaha untuk

---

<sup>27</sup> Margit Bussman and John R. Oneal, 2007, *Do Hegemons Distribute Private Goods? A Test of Power-Transition Theory*. Sage Publication. Vol. 51, No.1. Halaman 88-90

mengambil alih kekuasaan dari negara yang dominan tersebut dengan meningkatkan interaksi diberbagai bidang seperti diplomasi ekonomi atau militer.<sup>28</sup>

*Power Transition Theory* dalam penelitian ini dijadikan sebagai landasan pemahaman pendukung dalam memetakan strategi atau kepentingan yang dimiliki oleh Tiongkok, khususnya di bidang ekonomi. Hal ini dikaitkan dengan posisi Tiongkok yang tengah melakukan industrialisasi serta posisi Tiongkok yang sudah sangat maju, menyebabkan negara yang sudah lama melakukan industrialisasi merasa sedikit terancam dengan keadaan Tiongkok saat ini, misalnya Amerika Serikat.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional, konsep kerjasama internasional, teori ekonomi politik dan *power transition theory*. Konsep kepentingan nasional digunakan untuk menganalisis dan memetakan kepentingan nasional yang dimiliki oleh Tiongkok dalam kebijakan yang mereka keluarkan yaitu menginisiasi kerjasama RCEP. Dalam menganalisis bentuk kepentingan yang dimiliki oleh Tiongkok, penelitian ini menggunakan konsep kerjasama internasional, teori ekonomi politik dan *power transition theory* untuk menjadi landasan pemikiran dalam memetakan kepentingan – kepentingan yang dimiliki Tiongkok sesuai dengan literatur di atas.

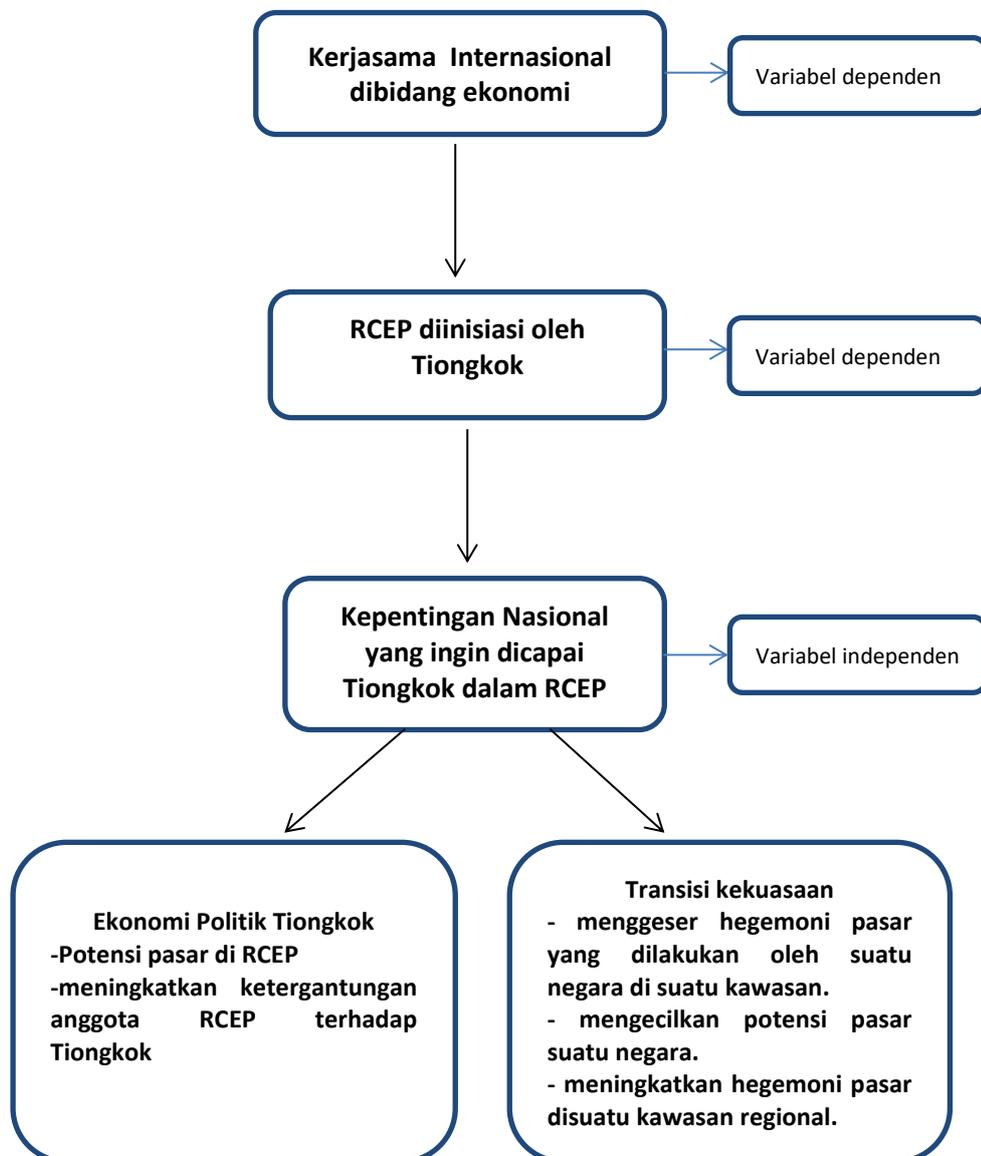
Kerjasama yang diinisiasikan oleh Tiongkok dapat menimbulkan beberapa kemungkinan. Dalam penelitian ini kerjasama RCEP menjadi variabel dependen

---

<sup>28</sup> Douglas Lemke, 1997, *The Continuation of History: Power Transition Theory and the End of the Cold War*, Florida State University. Vol.34, No.1. Halaman 24

yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepentingan nasional yang dimiliki oleh Tiongkok yaitu kepentingan ekonomi politik atau transisi kekuasaan. Sementara variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepentingan nasional, ekonomi politik dan transisi kekuasaan. Di bawah ini terdapat kerangka pikir dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

**Gambar 2.1** Model Kerangka Pemikiran Penelitian



**Sumber:** Diolah oleh peneliti.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dijelaskan oleh John W. Cresswell ialah sebagai penelitian yang fokus pada suatu analisis terhadap interpretasi data relevan atas isu yang diteliti. Penelitian kualitatif juga menekankan pada pemahaman mendalam mengenai sikap dan perilaku suatu aktor. Penelitian kualitatif juga berusaha mengeksplorasi dan memahami sebuah makna, baik dari kejadian individu atau kelompok yang dianggap sebagai masalah sosial.<sup>29</sup> Penelitian ini memiliki fokus terhadap sikap dan perilaku negara yang diamati. Penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dipenelitian ini menggunakan data yang didapatkan melalui sumber dokumen, situs resmi dan jurnal yang relevan dan dideskripsikan dalam penjabaran paragraf.

Metode deskriptif menurut Moh. Nazir adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, sistem pemikiran atau suatu peristiwa. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> John W. Cresswell. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. USA: SAGE Publication, Inc. Halaman 105

<sup>30</sup> Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Halaman 54

Penelitian yang ini akan berusaha untuk mengimpretasikan data dengan akurat dan dapat memberikan deskripsi kritis mengenai signifikansi dari perbedaan data baru dan kontradiksinya dengan data yang didapatkan sebelumnya. Melalui deskripsi kritis, penelitian ini diharapkan dapat menemukan pola dan pemetaan serta dapat menarik kesimpulan umum dari data yang dipaparkan.

Dalam penelitian ini, akan dipaparkan kepentingan apa saja yang dimiliki oleh Tiongkok dalam kerjasama RCEP, khususnya pada masa pemerintahan Xi Jinping. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan faktor – faktor yang mempengaruhi kepentingan Tiongkok dalam kerjasama RCEP.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan berfokus pada analisis kepentingan apa saja yang dimiliki oleh Tiongkok dalam kerjasama RCEP yang diinisiasikan oleh Tiongkok. Penelitian ini dijelaskan melalui beberapa konsep dan teori seperti konsep kerjasama internasional, konsep kepentingan nasional, teori ekonomi politik dan *power transition theory*. Beberapa konsep dan teori tersebut akan membantu saya dalam menganalisis kepentingan yang dimiliki oleh Tiongkok dalam kerjasama RCEP. Dalam menganalisis kepentingan yang dimiliki Tiongkok, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan analisis penelitian ini, yaitu faktor ekonomi dan politik. Penelitian ini akan mengkaji kepentingan ekonomi apa sajakah yang ingin dicapai oleh Tiongkok dan juga kepentingan politik apa sajakah yang ingin dicapai oleh Tiongkok.

### 3.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang mengenai kebijakan luar negeri Tiongkok dan kepentingan apa saja yang mereka miliki. Data ini bisa berupa pernyataan resmi kenegaraan atau dokumen terkait kebijakan luar negeri Tiongkok yang berhubungan dengan kerjasama perdagangan.

Data yang didapatkan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Nicholas Walliman, yaitu data yang didapatkan dari bahan tertulis seperti website, surat, catatan, buku, jurnal, Koran dan lain – lain. Data lainnya berbentuk data tidak tertulis seperti program televise, radio, rekaman suara, video, film dan lain – lain.<sup>31</sup>

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik dokumentasi. Teknik data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>32</sup> Penelitian ini akan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Studi kepustakaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dari sejumlah literatur, jurnal dan artikel. Selain itu teknik studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini akan menggunakan dokumen yang relevan seperti dokumen yang dimiliki oleh *World Bank* atau publikasi laporan kementerian perdagangan Tiongkok.

---

<sup>31</sup> Nicholas Walliman. 2011. *Research Methods: The Basics*. New York: Routledge. Halaman 74

<sup>32</sup> John W Cresswell. 2014. *Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 4th ed. USA: SAGE Publication, Inc. Halaman 178

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif memiliki tiga tahapan dalam proses analisis data. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data seperti yang dikatakan oleh Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut,<sup>33</sup>

#### **3.5.1. Reduksi Data**

Dalam penelitian kualitatif, reduksi data merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih baik dan mudah untuk diolah sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam mereduksi data, penelitian ini akan memilih dan memusatkan data atau informasi terkait dengan kepentingan yang dimiliki oleh Tiongkok.

#### **3.5.2. Penyajian Data**

Kegiatan ini merupakan tahapan yang dilakukan setelah melakukan tahapan reduksi data. Penyajian data merupakan upaya penyederhanaan data melalui teori dan konsep yang digunakan, lalu mempertajam dengan pertanyaan penelitian yang dilanjutkan dengan melakukan kembali pengumpulan data jika masih kurang lengkap. Dalam penelitian ini akan melakukan penyajian data terkait kepentingan Tiongkok dalam kerjasama RCEP, lalu dikaitkan dengan konsep serta teori yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **3.5.3. Penarikan Kesimpulan**

Tahapan terakhir dari proses ini ialah proses penarikan kesimpulan, yang merupakan upaya menarik kesimpulan akhir dari proses analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan akhir ini diperoleh sesuai dengan konsep dan teori yang

---

<sup>33</sup> Nicholas Walliman. 2011. *Research Methods: The Basics*. New York: Routledge. Halaman 129

digunakan dalam penelitian ini, sehingga akan terbentuk suatu kesatuan data yang akan memunculkan kesimpulan umum terkait penelitian. Makna dari interpretasi atas data yang diperoleh dan sudah dihubungkan dengan konsep serta teori yang digunakan akan diuraikan dalam bab hasil dan pembahasan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

Bab ini akan memaparkan kerjasama ekonomi regional yang diikuti Tiongkok dan juga kerjasama RCEP. Paparan di bab ini dibagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama akan menjelaskan sejarah kerjasama ekonomi regional yang diikuti Tiongkok, sub bab kedua memaparkan tentang kerjasama RCEP dan pada sub bab ketiga akan memaparkan tentang kepentingan Tiongkok dalam kerjasama ekonomi.

Tiongkok merupakan negara republik yang mengalami perubahan nama menjadi Republik Rakyat Tiongkok tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1949. Populasi penduduk yang dimiliki oleh Tiongkok merupakan tingkat populasi terpadat di dunia yang menempati urutan pertama di atas India dan Amerika Serikat.<sup>34</sup> Banyaknya jumlah penduduk yang dimiliki oleh Tiongkok merupakan salah satu sumber daya yang paling berpengaruh bagi perkembangan dalam kemajuan yang dialami oleh Tiongkok. Jumlah penduduk yang cukup tinggi dapat mendukung kemajuan perkembangan sumber daya manusia terutama bagi peningkatan pada bidang ekonomi industri, produksi, pembangunan dan perdagangan. Peningkatan atau kemajuan ini tentu dapat tercapai jika negara memiliki banyak sumber daya manusia yang produktif.

---

<sup>34</sup> WorldBank, “Peringkat Populasi Dunia”, (<https://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.totl>), diakses pada tanggal 10 April 2019

#### **4.1 Keikutsertaan Tiongkok Dalam Kerjasama Ekonomi Regional**

Tiongkok merupakan negara dengan angka populasi penduduk terbanyak di dunia. Tiongkok memiliki jumlah penduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa. Tiongkok melakukan reformasi di bidang ekonominya yaitu pada tahun 1978. Sejak saat itu Tiongkok mulai menggunakan kebijakan ekonominya berbasis pasar bebas atau perdagangan bebas.

Tiongkok merupakan salah satu negara dari 23 negara yang ikut meratifikasi GATT pada saat pertama kali dibentuk. Namun pada saat tahun 1949 Pemerintahan Tiongkok menyatakan keluar dari GATT tepatnya pasca terjadinya revolusi besar-besaran Tiongkok saat itu. Tiongkok mengalami fase revolusi dan juga reformasi dalam Pemerintahan Negara Tiongkok, hal inipun yang membuat beberapa perubahan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara Tiongkok khususnya dalam bidang ekonomi.

Revolusi yang terjadi di Tiongkok saat itu disebabkan oleh adanya perang saudara di dalam Pemerintahan Tiongkok yang berhasil dikuasai oleh otoritas partai komunis. Ketika revolusi ini terjadi di Tiongkok, Pemerintahan Tiongkok mengambil kebijakan sistem ekonomi tertutup yang dimana Tiongkok tidak melakukan kerjasama dengan dunia internasional saat itu sehingga mereka tidak ikut menjadi negara anggota GATT pada tahun 1949. Reformasi di Tiongkok pada tahun 1979 yang ditandai dengan adanya perubahan di dalam Pemerintahan Tiongkok yang diambil alih oleh partai nasionalis mulai mengeluarkan kebijakan ekonomi pasar sosialis. Kebijakan ekonomi pasar sosialis merubah fokus Tiongkok yang hanya dibidang agrikultur menjadi lebih berfokus pada bidang ekonomi lainnya seperti perdagangan internasional, industri, dan kerjasama

ekonomi. Bidang-bidang ini memiliki dampak yang sangat positif bagi masyarakat untuk bangkit dari krisis yang terjadi di Tiongkok saat itu.

Pasca terjadinya reformasi, tepatnya pada tahun 1985 Tiongkok mulai melakukan negosiasi dengan GATT untuk dapat diterima menjadi negara anggota GATT. Pada tahun 2001 Tiongkok resmi menjadi negara anggota WTO<sup>35</sup> tepatnya pada tanggal 11 Desember.<sup>36</sup> Pasca reformasi pada tahun 1978 menjadi suatu awal kebangkitan Tiongkok. Tiongkok mengalami perubahan serta perkembangan yang cukup signifikan dari kebijakan ekonomi internasional. Hal inipun membawa dampak positif bagi angka ekonomi Tiongkok untuk bangkit dari masa krisis di rezim komunis tradisional Mao Zedong. Setelah melakukan negosiasi dengan WTO Tiongkok mulai terlibat dalam perbincangan mengenai kerjasama ekonomi regional yang diawali dalam forum Asia Pasifik. Tiongkok bergabung dengan APEC (*Asian Pasific Economic Cooperation*) pada tahun 1991<sup>37</sup>. Setelah melakukan negosiasi dengan WTO dan sudah menjadi anggota APEC, Tiongkok mulai gencar meningkatkan intensitas kerjasama ekonomi regional dengan beberapa kawasan regional ataupun dengan negara – negara di berbagai kawasan.

Setelah mengetahui peluang yang dihasilkan dari kerjasama dalam bidang ekonomi, Tiongkok mulai gencar untuk meningkatkan intensitas kerjasama di bidang ekonomi internasionalnya. Setelah bergabung menjadi anggota APEC dan WTO Tiongkok mulai melakukan inisiatif untuk membentuk suatu kerjasama dengan negara – negara di kawasan Asia Tenggara. Tepat pada tahun 2000

---

<sup>35</sup> GATT berganti nama menjadi WTO pada tahun 1995.

<sup>36</sup> Yang Jiang, 2013, *China's Policymaking for Regional Economic Cooperation*, Palgrave Macmillan: United States. Halaman 11-12

<sup>37</sup> Ibid. halaman 14

Tiongkok mulai bernegosiasi dengan ASEAN untuk membentuk sebuah hubungan kerjasama perdagangan. Negosiasi Tiongkok dengan ASEAN pertama kali dilakukan pada *ASEAN Summit* ke empat di Singapura. Setelah melakukan negosiasi di beberapa pertemuan, kerjasama antara Tiongkok dengan ASEAN yang dinamai CAFTA atau (*China ASEAN Free Trade Area*) telah berhasil disetujui oleh masing-masing ketua dari setiap negara anggota tepat pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh Kamboja.<sup>38</sup>

Selain berkerjasama dengan ASEAN, Tiongkok tercatat sudah membentuk suatu kerjasama ekonomi dengan negara-negara dari berbagai kawasan. Tercatat dalam dokumen yang dimiliki WTO, Tiongkok sudah memiliki lebih dari dua puluh bentuk kerjasama ekonomi dengan berbagai negara. Di bawah ini terdapat data kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok dengan berbagai negara dan kawasan.

**Tabel 4.1** Kerjasama Regional Tiongkok

Bentuk Kerjasama	Negara	Kawasan	Tahun
Kerjasama Perdagangan barang	Thailand	Asia Pasific Trade Agreement (APTA)	1978
Kerjasama perdagangan barang dan jasa	Taiwan, Australia, Korea Selatan	Northeast Asia on Goods and Services,	2008
Kerjasama Bidang Investasi, Perdagangan Barang dan Jasa	Chile, Costarica, Hongkong, Islandia, Macau, Peru, Selandia Baru, Singapura, Swiss, Brazil.	Asia Timur, ASEAN dan RCEP	2010

Sumber : WTO tahun 2015

<sup>38</sup> Yang Jiang, 2013, *China's Policymaking for Regional Economic Cooperation*, Palgrave Macmillan: United States. Halaman 32-33

## 4.2 KERJASAMA RCEP

RCEP merupakan kerjasama perdagangan bebas yang terdiri dari enam belas negara yang diantaranya ialah negara-negara ASEAN dengan enam negara lainnya yaitu Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Australia, dan Selandia Baru. RCEP pada awalnya diinisiasi oleh Tiongkok yang lalu dibentuk pada bulan Agustus tahun 2012 tepatnya pada ASEAN *Summit* ke-21 di Kamboja. Pada pertemuan di Kamboja itupun yang diwakili oleh menteri ekonomi masing-masing negara anggota sudah sah untuk menyepakati *the Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership*.<sup>39</sup>

RCEP dalam proses pembentukannya diproyeksi dapat menjadi wadah dalam penciptaan pasar bebas yang dapat memberikan banyak keuntungan. Hal ini dapat dilihat dari total GDP seluruh anggota RCEP yang mencapai 30% dari total GDP seluruh negara.<sup>40</sup> RCEP memberikan ruang yang cukup besar bagi UKM di masing-masing negara anggotanya agar mendapatkan keuntungan lebih dalam mengatasi persaingan di era globalisasi dan liberalisasi perdagangan seperti saat ini. RCEP memiliki prinsip-prinsip bagi anggotanya dalam menjalankan kerjasama, prinsip-prinsip inipun sudah disetujui oleh masing-masing kepala negara anggota. Di bawah ini terdapat daftar dokumen dari prinsip kerjasama RCEP.<sup>41</sup>

*1. The RCEP will be consistent with the WTO, including GATT Article XXIV and GATS Article V.* (RCEP akan konsisten dengan WTO, termasuk GATT artikel XXIV dan GATS artikel V)

---

<sup>39</sup> ASEAN, “*Regional Comprehensive Economic Partnership*” ([asean.org?static\\_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership](http://asean.org?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership)), 10 April 2019

<sup>40</sup> Ibid. 10 April 2019

<sup>41</sup> Ibid. 10 April 2019

2. *The RCEP will have broader and deeper engagement with significant improvements over the existing ASEAN+1 FTAs, while recognizing the individual and diverse circumstances of the participating countries.* (RCEP akan memiliki keterlibatan yang lebih luas dan lebih dalam dengan peningkatan secara signifikan atas FTA ASEAN + 1 yang ada, sambil mengakui keadaan individu dan beragam dari negara-negara yang berpartisipasi.)

3. *The RCEP will include provisions to facilitate trade and investment and to enhance transparency in trade and investment relations between the participating countries, as well as to facilitate the participating countries' engagement in global and regional supply chains.* (RCEP akan mencakup ketentuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi serta untuk meningkatkan transparansi dalam perdagangan dan hubungan investasi antara negara-negara yang berpartisipasi dan juga untuk memfasilitasi keterlibatan negara-negara peserta dalam rantai pasokan global dan regional.)

4. *Taking into consideration the different levels of development of the participating countries, the RCEP will include appropriate forms of flexibility including provision for special and differential treatment, plus additional flexibility to the least-developed ASEAN Member States, consistent with the existing ASEAN+1 FTAs, as applicable.* (Mempertimbangkan berbagai tingkat perkembangan negara-negara yang berpartisipasi, RCEP akan mencakup bentuk-bentuk fleksibilitas yang sesuai termasuk ketentuan untuk perlakuan khusus dan berbeda, ditambah fleksibilitas tambahan untuk Negara-negara Anggota ASEAN yang paling kurang berkembang, konsisten dengan FTA ASEAN+1 yang ada sebagaimana berlaku)

*5. The ASEAN+1 FTAs and the bilateral/plurilateral FTAs between and among participating countries will continue to exist and no provision in the RCEP agreement will detract from the terms and conditions in these bilateral/plurilateral FTAs between and among the participating countries. (FTA ASEAN + 1 dan FTA bilateral / plurilateral di antara negara-negara peserta akan terus ada dan tidak ada ketentuan dalam perjanjian RCEP yang akan mengurangi syarat dan ketentuan FTA bilateral / plurilateral antara dan di antara negara-negara yang berpartisipasi)*

*6. Any ASEAN FTA Partner that did not participate in the RCEP negotiations at the outset would be allowed to join the negotiations, subject to terms and conditions that would be agreed with all other participating countries. The RCEP agreement will also have an open accession clause to enable the participation of any ASEAN FTA partner that did not participate in the RCEP negotiations and any other external economic partners after the completion of the RCEP negotiations. (Setiap Mitra FTA ASEAN yang tidak berpartisipasi dalam negosiasi RCEP sejak awal akan diizinkan untuk bergabung dengan negosiasi, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang akan disepakati dengan semua negara peserta lainnya. Perjanjian RCEP juga akan memiliki klausa akses terbuka untuk memungkinkan partisipasi mitra FTA ASEAN yang tidak berpartisipasi dalam negosiasi RCEP dan mitra ekonomi eksternal lainnya setelah penyelesaian negosiasi RCEP.)*

*7. Provisions for technical assistance and capacity building may be made available, building upon the ASEAN+1 FTAs, to the developing and least-developed countries participating in the RCEP to enable all parties to fully*

*participate in the negotiations, implement obligations under the RCEP and enjoy the benefits from the RCEP.* (Ketentuan untuk bantuan teknis dan peningkatan kapasitas dapat dibuat tersedia, dibangun berdasarkan FTA ASEAN + 1, untuk negara-negara berkembang dan paling tidak berkembang yang berpartisipasi dalam RCEP untuk memungkinkan semua pihak untuk berpartisipasi penuh dalam negosiasi, melaksanakan kewajiban di bawah RCEP dan menikmati manfaat dari RCEP.)

8. *The negotiations on trade in goods, trade in services, investment and other areas will be conducted in parallel to ensure a comprehensive and balanced outcome.* (Negosiasi perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi dan bidang lainnya akan dilakukan secara paralel untuk memastikan hasil yang komprehensif dan seimbang.)

Kelompok kerjasama dalam RCEP:

I. *TRADE IN GOODS*

*The RCEP will aim at progressively eliminating tariff and non-tariff barriers on substantially all trade in goods in order to establish a free trade area among the parties. Tariff negotiations will be conducted on a comprehensive basis. Such negotiations should aim to achieve the high level of tariff liberalization, through building upon the existing liberalization levels between RCEP participating countries and through tariff elimination on a high percentage of both tariff lines and trade value. The scheduling of tariff commitments should seek to maximize the benefits of regional economic integration. Priority will be attached to early tariff elimination on products of interest to the*

*least developed ASEAN Member States.* (Perdagangan Barang RCEP akan bertujuan untuk secara progresif menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif pada semua perdagangan barang secara substansial untuk membangun area perdagangan bebas di antara para pihak. Negosiasi tarif akan dilakukan secara komprehensif. Negosiasi semacam itu harus bertujuan untuk mencapai tingkat tinggi liberalisasi tarif, melalui membangun tingkat liberalisasi yang ada antara negara-negara peserta RCEP dan melalui penghapusan tarif pada persentase tinggi dari kedua jalur tarif dan nilai perdagangan. Penjadwalan komitmen tarif harus berupaya memaksimalkan manfaat dari integrasi ekonomi regional. Prioritas akan dilampirkan pada penghapusan tarif awal atas produk-produk yang menarik bagi Negara-negara Anggota ASEAN yang paling tidak berkembang.)

## II. *TRADE IN SERVICES*

*The RCEP will be comprehensive, of high quality and substantially eliminate restrictions and/or discriminatory measures with respect to trade in services between the RCEP participating countries. Rules and obligations on trade in services under the RCEP will be consistent with the General Agreement on Trade in Services (GATS) and will be directed towards achieving liberalization commitments building on the RCEP participating countries' commitments under the GATS and the ASEAN+1 FTAs. All sectors and modes of supply will be subject to negotiations.* (Perdagangan Dalam Layanan Jasa RCEP akan bersifat komprehensif, berkualitas tinggi dan secara substansial menghilangkan

pembatasan dan / atau tindakan diskriminatif sehubungan dengan perdagangan jasa antara negara-negara peserta RCEP. Aturan dan kewajiban perdagangan jasa di bawah RCEP akan konsisten dengan Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) dan akan diarahkan untuk mencapai komitmen liberalisasi yang dibangun di atas komitmen negara-negara peserta RCEP di bawah GATS dan FTA ASEAN + 1. Semua sektor dan mode pasokan akan dikenakan negosiasi.)

### III. *INVESTMENT*

*The RCEP will aim at creating a liberal, facilitative, and competitive investment environment in the region. Negotiations for investment under the RCEP will cover the four pillars of promotion, protection, facilitation and liberalization. (INVESTASI RCEP akan bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang liberal, fasilitatif, dan kompetitif di kawasan ini. Negosiasi untuk investasi di bawah RCEP akan mencakup empat pilar promosi, perlindungan, fasilitasi, dan liberalisasi.)*

### IV. *ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION*

*Economic and technical cooperation under the RCEP will aim at narrowing development gaps among the parties and maximizing mutual benefits from the implementation of the RCEP agreement. The economic and technical cooperation provisions in the RCEP will build upon existing economic cooperation arrangements between ASEAN and ASEAN's FTA partners participating in the RCEP. Cooperation*

*activities should include electronic commerce and other areas that would be mutually agreed upon by the RCEP participating countries.*

(EKONOMI DAN TEKNIS KERJASAMA, RCEP akan bertujuan untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di antara para pihak dan memaksimalkan saling menguntungkan dari pelaksanaan perjanjian RCEP. Ketentuan kerjasama ekonomi dan teknis dalam RCEP akan dibangun di atas pengaturan kerjasama ekonomi yang ada antara ASEAN dan mitra FTA ASEAN yang berpartisipasi dalam RCEP. Kegiatan kerjasama harus mencakup perdagangan elektronik dan bidang lain yang akan disepakati bersama oleh negara-negara peserta RCEP)

#### V. *INTELLECTUAL PROPERTY*

*The text on intellectual property in the RCEP will aim to reduce IP-related barriers to trade and investment by promoting economic integration and cooperation in the utilization, protection and enforcement of intellectual property rights.* (KEKAYAAN INTELEKTUAL, Teks tentang kekayaan intelektual dalam RCEP akan bertujuan untuk mengurangi hambatan terkait IP untuk perdagangan dan investasi dengan mempromosikan integrasi ekonomi dan kerja sama dalam pemanfaatan, perlindungan, dan penegakan hak-hak kekayaan intelektual.)

#### VI. *COMPETITION*

*Provisions on competition will form the basis for parties to cooperate in the promotion of competition, economic efficiency, consumer*

*welfare and the curtailment of anti-competitive practices while cognizant of the significant differences in the capacity and national regimes of RCEP participating countries in the area of competition.* (PERSAINGAN Ketentuan mengenai kompetisi akan menjadi dasar bagi pihak-pihak untuk bekerja sama dalam mempromosikan kompetisi, efisiensi ekonomi, kesejahteraan konsumen dan pengurangan praktik anti-persaingan sementara menyadari perbedaan signifikan dalam kapasitas dan rezim nasional negara-negara peserta RCEP di wilayah tersebut. kompetisi.)

VII. *DISPUTE SETTLEMENT*

*The RCEP will include a dispute settlement mechanism that would provide an effective, efficient and transparent process for consultations and dispute resolution.* (PENYELESAIAN SENGKETA RCEP akan mencakup mekanisme penyelesaian perselisihan yang akan memberikan proses konsultasi dan penyelesaian perselisihan yang efektif, efisien dan transparan.)

VIII. *OTHER ISSUES*

*The RCEP negotiations will consider including other issues covered by FTAs among RCEP participating countries, which may be identified and mutually agreed in the course of negotiations, and take into account new and emerging issues relevant to business realities.* (MASALAH LAINNYA Negosiasi RCEP akan mempertimbangkan termasuk isu-isu lain yang dicakup oleh FTA di antara negara-negara peserta RCEP, yang dapat diidentifikasi dan disepakati bersama dalam

proses negosiasi, dan mempertimbangkan masalah baru dan yang muncul yang relevan dengan realitas bisnis.)

Dalam perkembangan kerjasama RCEP telah melakukan beberapa perbaikan dalam kesepakatan yang dilakukan dari tahun 2012 sampai 2019. Kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan dalam RCEP secara umum berfokus pada bidang perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi. kerjasama RCEP sudah melakukan dua belas kali pertemuan yang dimana delapan diantaranya diwakili oleh masing-masing menteri dan sisanya diwakili oleh masing-masing kepala negara setiap anggota RCEP. Di bawah ini terdapat hasil kesepakatan yang dilakukan di setiap pertemuan.<sup>42</sup>

1. Kesepakatan dalam mengadopsi kerjasama RCEP yang dilakukan oleh para kepala negara pada tahun 2012 di Kamboja.
2. Menyetujui pembentukan tiga *working group* atau kelompok kerja yaitu dibidang perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi. kesepakatan ini diwakili oleh para menteri yang dilakukan di Brunei Darussalam pada tanggal 19 Agustus 2013.
3. Negosiasi kerjasama ekonomi lain seperti kekayaan intelektual, persaingan dalam perdagangan, masalah hukum serta kelembagaan. Kesepakatan ini diwakili oleh para menteri yang dilakukan di Myanmar pada tanggal 27 Agustus 2014.
4. Kesepakatan dalam membuat akses pasar yang substantif agar dapat mencapai ekonomi modern, transparan dan adil. Kesepakatan ini membuat negara berkembang dan negara maju mendapatkan keuntungan yang sama.

---

<sup>42</sup> ASEAN, “*Regional Comprehensive Economic Partnership*” ([asean.org?static\\_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership](http://asean.org?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership)), 10 April 2019

Hal ini disepakati oleh para menteri yang dilakukan di Malaysia pada tanggal 24 Agustus 2015.

5. Penyempurnaan perjanjian RCEP dengan memberikan panduan kebijakan strategis untuk memajukan negosiasi khususnya dalam perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi. kesepakatan ini dilakukan oleh para menteri di Filipina pada tanggal 3-4 November 2016.
6. Kesepakatan dalam penambahan aturan yang memfasilitasi perdagangan modern. Pertemuan ini dihadiri oleh para menteri di Vietnam pada tanggal 21-22 Mei 2017.
7. Kesepakatan dalam membentuk kelompok kerja baru yaitu kelompok kerja pengadaan pemerintah dan sub-kelompok kerja pemulihan perdagangan. Kesepakatan ini dilakukan di Filipina oleh para menteri pada tanggal 10 September 2017
8. Kesepakatan dalam meratifikasi peraturan disetiap kelompok kerja. Kesepakatan ini dilakukan oleh masing-masing kepala negara yang dilakukan di Filipina pada tanggal 14 November 2017.
9. Negosiasi dalam membentuk peraturan yang memfasilitasi perdagangan dan investasi agar dapat menghasilkan lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lahan pekerjaan. Kesepakatan ini dilakukan oleh para menteri di Singapura pada tanggal 3 Maret 2018

### **4.3 Fokus Kepentingan Tiongkok di Bidang Kerjasama Ekonomi**

Tiongkok sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai. Kepentingan nasional Tiongkok berasal dari

pelbagai sektor, salah satu yang memiliki perhatian tinggi bagi pemerintahannya adalah sektor ekonomi perdagangan. Untuk sektor ekonomi perdagangan, Tiongkok memiliki tujuh belas sub-sektor yang menjadi fokus dalam kepentingan mereka, yaitu di antaranya ialah:<sup>43</sup>

1. *To formulate the strategies, guidelines and policies of developing domestic and foreign trade with international economic cooperation, draft the laws and regulations governing domestic and foreign trade, foreign investment in Tiongkok, foreign assistance, overseas investment and foreign economic cooperation, devise relevant departmental rules and regulations.* (untuk merumuskan strategi, pedoman dan kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri serta kerjasama ekonomi internasional, menentukan rancangan undang-undang dan peraturan yang mengatur perdagangan dalam dan luar negeri, investasi asing di Tiongkok, bantuan asing dan kerjasama ekonomi lainnya).
2. *To advance the structural readjustment of distribution industries, guide the reform of distribution enterprises, the development of commercial and trade services. Promote distribution standardization and such modern distribution modalities as chain operation, franchising, logistics and e-commerce.* (untuk memajukan penyesuaian struktural industri distribusi, memandu reformasi perusahaan distribusi, pengembangan layanan komersial dan perdagangan jasa. Mempromosikan perusahaan kecil dan standarisasi distribusi sert modalitas distribusi modern seperti sistem rantai toko, waralaba, logistic dan penjualan elektronik).

---

<sup>43</sup> EIU, “*Ministry of Commerce People’s Republic of Tiongkok.*”, (<https://store.eiu.com/product/country-commerce/china>). 10 April 2019

3. *To formulate development plans for domestic trade, foster and develop urban and rural markets, study and put forward the policies guiding domestic and foreign capital to flow to the development of a market system, to guide the program of bulk commodities retail markets and the planning of urban commercial networks, guide the construction of the commercial system, advance rural market system construction, and organize and implement modern rural distribution networks.* (Untuk merumuskan rencana pengembangan perdagangan dalam negeri, menumbuhkan dan mengembangkan pasar perkotaan dan pedesaan, mempelajari dan mengedepankan kebijakan yang memandu modal domestik dan asing untuk mengalir ke pengembangan sistem pasar)
4. *To lead the coordination work for rectifying and standardizing international market economy order, formulate policies for standardizing market operation and distribution order, promote credit building in commerce sectors, give guidance to sales based on business credit, construct public service platforms based on market credibility, and supervise and administer the special distribution industries according to relevant rules.* (Untuk memimpin pekerjaan koordinasi dalam memperbaiki dan membakukan tatanan ekonomi pasar internasional, merumuskan kebijakan untuk membakukan operasi pasar dan tatanan distribusi, mempromosikan pembangunan kredit di sektor perdagangan, memberikan panduan untuk penjualan berdasarkan kredit bisnis, membangun platform layanan publik berdasarkan kredibilitas pasar,

mengawasi dan mengelola industri distribusi khusus sesuai dengan aturan yang relevan).

5. *To organize the adjustment of market of major consumer goods and regulation of the distribution of major means of production, institute an emergency management mechanism for the market supply of life necessities, monitor and analyze market activities and commodity supply and demand, study and analyze the commodity information to make forecasts, issue early warnings and provide guiding information. To be responsible for important consumer goods reserve management and market regulation in line with its assignments. To supervise and regulate refined oil distribution in accordance with relevant regulations.* (Untuk mengatur penyesuaian pasar barang-barang konsumen utama dan regulasi distribusi alat-alat produksi utama, buat mekanisme manajemen darurat untuk pasokan pasar kebutuhan hidup, memantau dan menganalisis kegiatan pasar dan penawaran dan permintaan komoditas, mempelajari dan menganalisis komoditas informasi untuk membuat ramalan, mengeluarkan peringatan dini dan memberikan informasi panduan. Bertanggung jawab atas manajemen cadangan barang konsumen yang penting dan regulasi pasar sesuai dengan penugasannya. Mengawasi dan mengatur distribusi minyak sulingan sesuai dengan peraturan terkait.)
6. *To work out measures for the regulation of import and export commodities and processing trade, and compile catalogues of import and export commodities and technologies. To draft policies and measures for facilitating the transformation of foreign trade growth pattern. To*

*organize the implementation of import and export quota plan of important industrial products, raw materials and important agricultural products. To work with other ministries and commissions to coordinate the import and export of bulk commodities, guide trade promotion activities and the development of the foreign trade promotion system.* (Untuk menyusun langkah-langkah pengaturan impor dan ekspor komoditas dan pemrosesan perdagangan, dan menyusun katalog impor dan ekspor komoditas dan teknologi. Untuk menyusun kebijakan dan langkah-langkah untuk memfasilitasi transformasi pola pertumbuhan perdagangan luar negeri. Untuk mengatur pelaksanaan rencana kuota impor dan ekspor produk industri penting, bahan baku dan produk pertanian penting. Untuk bekerja dengan kementerian dan komisi lain untuk mengoordinasikan impor dan ekspor komoditas curah, membimbing kegiatan promosi perdagangan dan pengembangan sistem promosi perdagangan luar negeri.)

7. *To draft and execute policies concerning trade in technology, export control and policies encouraging the import and export of technology and complete set of equipment; to push forward the establishment of foreign trade standardization system. To supervise technology introduction, equipment import, export of domestic technologies subject to state export restriction, and to issue import and export licenses pertaining to national security issues such as nuclear non-proliferation in conformity with laws.* (Untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan tentang perdagangan teknologi, kontrol ekspor dan kebijakan yang mendorong impor dan ekspor teknologi dan serangkaian peralatan lengkap; untuk mendorong

pengembangan sistem standardisasi perdagangan luar negeri. Untuk mengawasi pengenalan teknologi, impor peralatan, ekspor teknologi dalam negeri yang tunduk pada pembatasan ekspor negara, dan untuk menerbitkan izin impor dan ekspor yang berkaitan dengan masalah keamanan nasional seperti non-proliferasi nuklir sesuai dengan undang-undang.)

8. *To lead the efforts to draft development plans for trade in services and carry out relevant work, work with other ministries and commissions to formulate and enforce the plans and policies for promoting services export and services outsourcing development. To facilitate the construction of services outsourcing platforms.* (Untuk memimpin upaya untuk menyusun rencana pengembangan untuk perdagangan jasa dan melakukan pekerjaan yang sesuai, bekerja dengan kementerian dan komisi lain untuk merumuskan dan menegakkan rencana dan kebijakan untuk mempromosikan layanan ekspor dan pengembangan layanan outsourcing. Untuk memfasilitasi pembangunan platform layanan outsourcing.)
9. *To formulate multilateral and bilateral (including regional and free trade area) trade and economic cooperation strategies and policies, be responsible for multilateral and bilateral negotiations on trade and economic issues, coordinate domestic positions in negotiating with foreign parties, and to sign the relevant documents and monitor their implementation. To establish multilateral and bilateral intergovernmental liaison mechanisms for economic and trade affairs and organize the related work.* (Untuk merumuskan strategi dan kebijakan perdagangan

multilateral dan bilateral (termasuk kawasan perdagangan bebas dan regional), bertanggung jawab atas negosiasi multilateral dan bilateral mengenai isu-isu perdagangan dan ekonomi, mengoordinasikan posisi domestik dalam bernegosiasi dengan pihak asing, dan menandatangani dokumen yang relevan dan memonitor implementasinya. Untuk membangun mekanisme penghubung antar pemerintah multilateral dan bilateral untuk urusan ekonomi dan perdagangan dan mengatur pekerjaan terkait.)

10. *To organize and coordinate the work pertaining to antidumping, countervailing, safeguard measures and other issues related to fair trade for import and export. To institute a fair trade early warning mechanism for import and export and organize foreign trade investigations and industry injury investigations in compliance with law. To guide and coordinate domestic efforts in responding to industry security inquires and foreign antidumping, countervailing, and safeguard investigations.*

( Untuk mengatur dan mengoordinasikan pekerjaan yang berkaitan dengan tindakan antidumping, countervailing, upaya perlindungan dan masalah lain yang terkait dengan perdagangan yang adil untuk impor dan ekspor. Untuk melembagakan mekanisme peringatan dini perdagangan yang adil untuk impor dan ekspor dan mengatur penyelidikan perdagangan luar negeri dan investigasi cedera industri sesuai dengan hukum. Untuk memandu dan mengoordinasikan upaya domestik dalam menanggapi permintaan keamanan industri dan penyelidikan antidumping, penyeimbang, dan upaya perlindungan asing.)

11. *To give general guidance to nationwide efforts in foreign investment. To draw up and enforce foreign investment policies and reform schemes. To examine and approve, according to relevant laws, the establishment and changes thereafter of foreign-invested enterprises. To verify the contracts and statutes of large-scale projects with foreign investment and their major subsequent changes particularly stipulated in relevant legislations. To supervise and inspect the enforcement of laws, regulations, contracts and statutes by foreign-invested enterprises and coordinate the solution of relevant issues.* (Untuk memberikan panduan umum untuk upaya nasional dalam investasi asing. Untuk menyusun dan menegakkan kebijakan investasi asing dan skema reformasi. Untuk memeriksa dan menyetujui, menurut undang-undang yang relevan, pendirian dan perubahan sesudahnya dari perusahaan investasi asing. Untuk memverifikasi kontrak dan ketetapan dari proyek-proyek skala besar dengan investasi asing dan perubahan besar berikutnya, khususnya diatur dalam undang-undang yang relevan.)
12. *To be responsible for China's foreign economic cooperation efforts. To formulate and implement policies on foreign economic cooperation, guide and monitor overseas project contracting and labor service cooperation in accordance with laws, promulgate policies governing the overseas employment of Chinese citizens, and take the lead in protecting the rights and interests of Chinese citizens providing labor services or taking up jobs overseas. To work out administrative measures and specific policies guiding China's outward investment and approve Chinese companies to*

*invest in and set up overseas establishments (excluding financial companies).* (Bertanggung jawab atas upaya kerja sama ekonomi asing Tiongkok. Untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan tentang kerja sama ekonomi asing, membimbing dan memantau kontrak proyek luar negeri dan kerja sama layanan ketenagakerjaan sesuai dengan undang-undang, mengumumkan kebijakan yang mengatur ketenagakerjaan warga negara Tiongkok di luar negeri, dan memimpin dalam melindungi hak dan kepentingan warga Negara Tiongkok yang menyediakan tenaga kerja layanan atau mengambil pekerjaan di luar negeri. Untuk melakukan tindakan administratif dan kebijakan khusus yang memandu investasi luar Tiongkok dan menyetujui perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi dan mendirikan perusahaan di luar negeri (tidak termasuk perusahaan keuangan).

13. *To be in charge of China's efforts in providing aid to foreign countries and regions. To formulate and implement China's foreign aid policies and plans, facilitate the reform on foreign aid provision modalities, compile foreign aid programs, select foreign aid projects and organize their implementations. To manage funds in the nature of China's official foreign assistance, the grant aid provided to China through multilateral and bilateral channels (excluding the grants provided by foreign governments and international financial institutions under the framework of fiscal cooperation) and other development cooperation programs.* (Untuk bertanggung jawab atas upaya Tiongkok dalam memberikan bantuan kepada negara dan wilayah asing. Untuk merumuskan dan

mengimplementasikan kebijakan dan rencana bantuan luar negeri Tiongkok, memfasilitasi reformasi modalitas penyediaan bantuan luar negeri, menyusun program bantuan asing, memilih proyek-proyek bantuan asing dan mengatur implementasinya. Untuk mengelola dana dalam bentuk bantuan asing resmi Tiongkok, bantuan hibah diberikan kepada Tiongkok melalui saluran multilateral dan bilateral (tidak termasuk hibah yang diberikan oleh pemerintah asing dan lembaga keuangan internasional di bawah kerangka kerja sama fiskal) dan program kerja sama pembangunan lainnya.)

14. *To organize the direct trading activities with Taiwan, and deal with bilateral and multilateral trade issues involving Taiwan.* (Untuk mengatur kegiatan perdagangan langsung dengan Taiwan, dan menangani masalah perdagangan bilateral dan multilateral yang melibatkan Taiwan.)
15. *To launch anti-monopoly investigations on the concentration of undertakings, guide Chinese companies' response to monopoly allegations overseas and carry out bilateral and multilateral exchanges and cooperation on competition policies.* (Untuk meluncurkan investigasi anti-monopoli pada konsentrasi usaha, membimbing respon perusahaan Tiongkok terhadap tuduhan monopoli di luar negeri dan melakukan pertukaran bilateral dan multilateral dan kerjasama mengenai kebijakan persaingan.)
16. *To steer the work of the commercial branches of China's permanent missions to the WTO, to the UN and other relevant international organizations, as well as Chinese embassies in foreign countries,*

*providing guidance to their work, and training and selecting the staff. To keep in touch with the representative offices of multilateral and international economic and trade organizations in China and the commercial functions of foreign diplomatic missions in China.* (Untuk mengarahkan pekerjaan cabang komersial dari misi permanen Tiongkok ke WTO, ke PBB dan organisasi internasional terkait lainnya, serta kedutaan besar Tiongkok di negara-negara asing, memberikan panduan untuk pekerjaan mereka, dan melatih serta memilih staf. Untuk tetap berhubungan dengan kantor perwakilan organisasi ekonomi dan perdagangan multilateral dan internasional di Tiongkok dan fungsi komersial misi diplomatik asing di Tiongkok.)

17. *To undertake other assignments entrusted by the State Council.* (Untuk melakukan tugas-tugas lain yang dipercayakan oleh Dewan Negara.)

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dan hasil dalam bab ini berisikan analisis dari kepentingan kerjasama RCEP yang dapat dilihat angka indikator perekonomian Tiongkok baik itu sebelum dibentuknya kerjasama RCEP sampai setelah berjalannya kerjasama RCEP. Dalam waktu sebelum disahkan sampai sudah berjalannya kerjasama RCEP ini ditemukan beberapa hal menarik untuk dijadikan objek penelitian. Kerjasama RCEP inipun menarik untuk dikaji lebih lanjut karena sebelum adanya kerjasama RCEP Tiongkok sudah memiliki kerjasama bilateral dengan masing-masing negara anggota RCEP. Adanya indikasi lain yang membuat Tiongkok memiliki kepentingan lebih dalam menginisiasi RCEP ini ialah ketika Tiongkok tidak ikut dalam kerjasama antar regional lainnya seperti kerjasama TPP (*Trans Pacific Partnership*).

Selain itu dalam beberapa indikator ekonomi Tiongkok yang menjadi objek penelitian mengalami beberapa perubahan selama jangka waktu sebelum disahkannya RCEP sampai berjalannya kerjasama RCEP. Hal itu juga membuat beberapa perubahan dalam struktur hegemoni antar negara dalam bidang ekonomi. Pergeseran struktur hegemoni inilah yang mendasari penulis untuk meneliti apakah hal tersebut menjadi salah satu kepentingan Tiongkok dalam menginisiasi kerjasama RCEP.

Selain adanya hal tersebut, dalam bab inipun juga menganalisis motif kepentingan yang dimiliki oleh Tiongkok dalam kerjasama RCEP. Oleh karena itu dalam bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Pertama, sub bab 5.1 yang berisikan mengenai peningkatan atau perubahan dalam indikator ekonomi Tiongkok seperti GDP, GNP, FDI, ekspor dan impor dalam waktu sebelum disahkannya kerjasama RCEP sampai setelah kerjasama ini sudah berjalan. Kedua, sub bab 5.2 yang berisikan pembahasan mengenai motif kepentingan yang dimiliki oleh Tiongkok dalam kerjasama RCEP.

### **5.1 Angka Perekonomian Tiongkok Tahun 2010-2017**

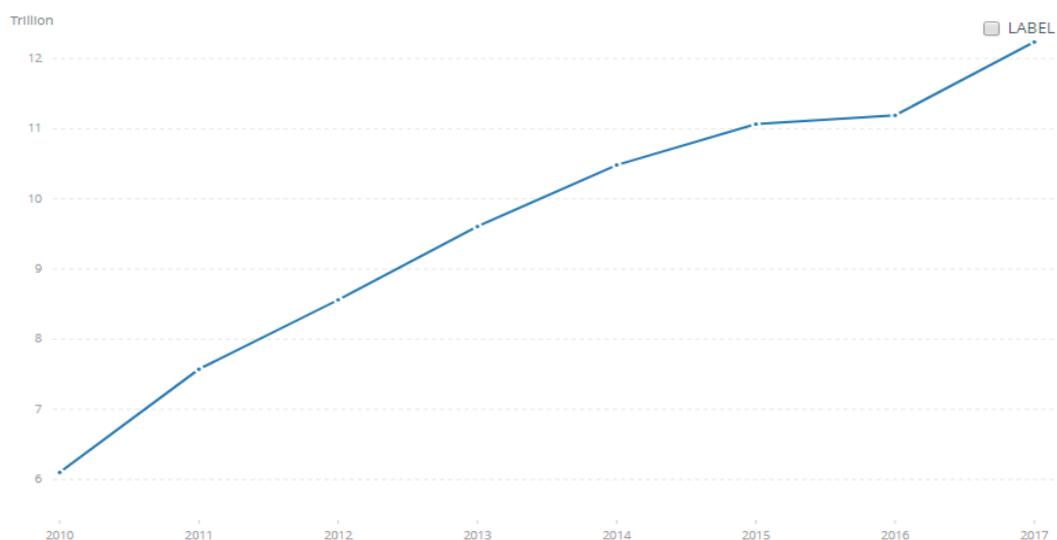
Untuk melihat kondisi ekonomi di suatu negara terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menjadi bahan analisis. Indikator yang digunakan merupakan indikator yang dipengaruhi oleh bentuk kegiatan sosial, ekonomi ataupun politik.<sup>44</sup> Untuk melihat kondisi perkenomian Tiongkok, dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa indikator ekonomi untuk menjadi alat analisis dalam membuktikan hipotesis yang terdapat pada penelitian ini. Indikator yang digunakan ialah angka pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*), angka pertumbuhan GNP (*Gross National Product*), angka pertumbuhan FDI (*Foreign Direct Investmen*) yang terakhir yaitu angka ekspor dan impor. Data yang akan disajikan dalam penelitian ini akan menggunakan data pada tahun 2010 sampai 2017 yang menandakan sebelum adanya kerjasama RCEP dan pasca dibentuknya kerjasama RCEP.

---

<sup>44</sup> William Zartman, James A Paul and John P. Entelis, 2014, *An Economic Indicator of Socio-Political Unrest*. Cambridge University Press. Vol 2, no.4. halaman 293

### 5.1.1 Angka Pertumbuhan GDP Tiongkok

Kondisi ekonomi dapat dilihat dari angka pertumbuhan GDP atau *Gross Domestic Product* yang terdiri dari beberapa komponen antara pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Dalam komponen pendapatan dan pengeluaran terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi angka pertumbuhan GDP suatu negara. Beberapa indikator dalam angka GDP ialah pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto atau juga investasi, selanjutnya inventori atau aset dan ekspor impor.<sup>45</sup> Di bawah ini terdapat data angka GDP yang dimiliki Tiongkok dari tahun 2010 sampai tahun 2017.



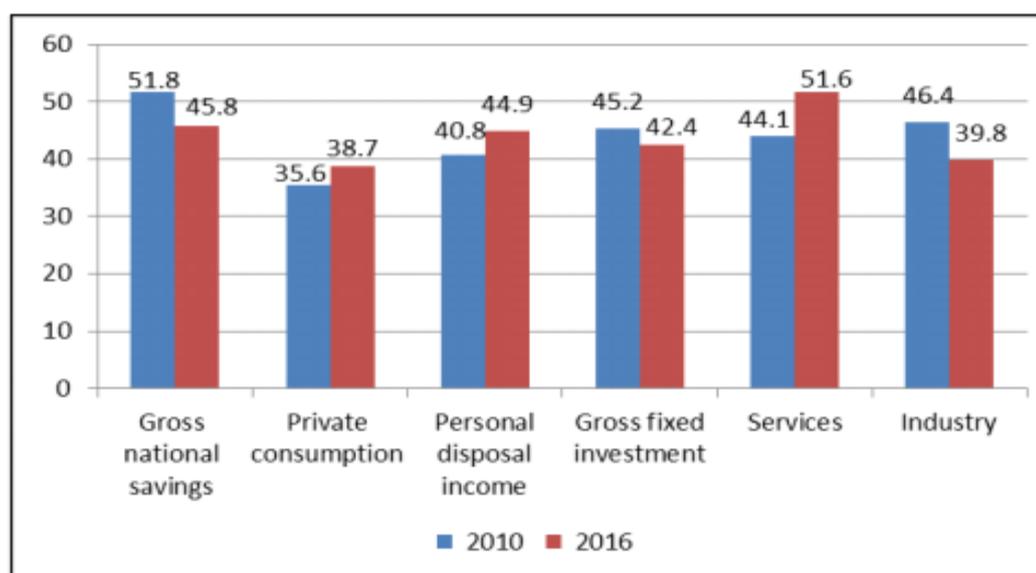
Tahun	Trilyun US\$	Tahun	Trilyun US\$
2010	6.100.	2014	10.482.
2011	7.572.	2015	11.064.
2012	8.560.	2016	11.190.
2013	9.607.	2017	12.237.

Sumber: WorldBank.com

**Gambar 5.1** Data Peningkatan GDP Tiongkok Tahun 2010-2017

<sup>45</sup> BPS, "Indikator GDP", ([www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html](http://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html)). 10 April 2019

Tiongkok merupakan salah satu negara yang mengalami peningkatan setiap tahunnya pada angka GDP. Hal ini dapat dilihat dari data di atas yang menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki angka GDP yang meningkat cukup signifikan di setiap tahunnya. Tiongkok berhasil meningkatkan angka GDP mereka dengan melakukan peningkatan pada beberapa sektor seperti sektor ekspor dan juga investasi. Di bawah ini terdapat data indikator yang mempengaruhi besaran angka GDP yang dimiliki oleh Tiongkok.



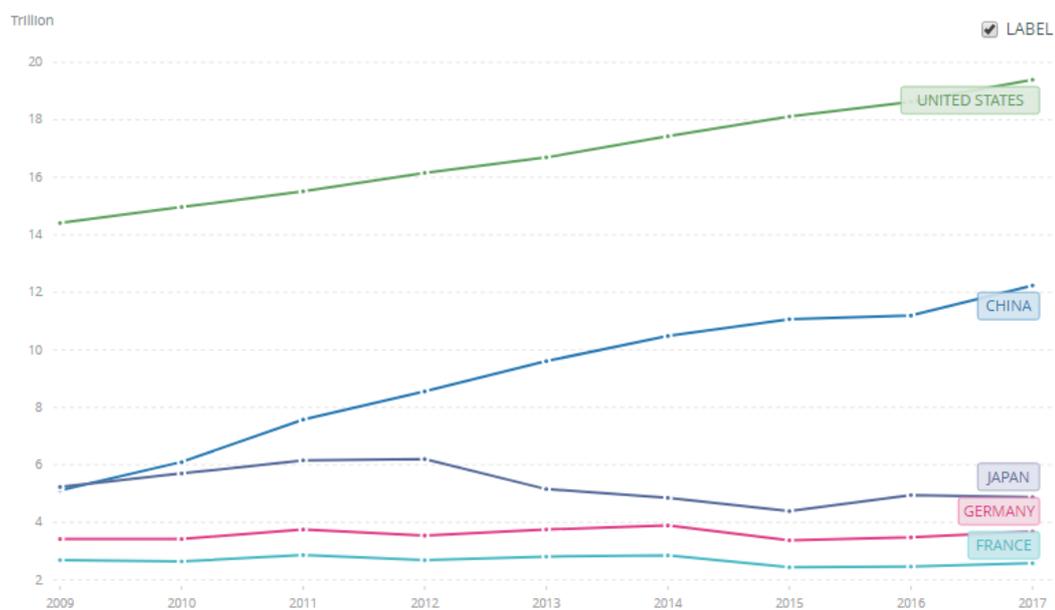
**Sumber:** www.eiu.com (Economic Intelligence Unit)

**Gambar 5.2** Persentasi Indikator GDP Tiongkok

Kebijakan Tiongkok dengan melakukan perubahan menggunakan sistem pasar bebas membuat peningkatan pada angka GDP negara Tiongkok. Salah satu kebijakan Tiongkok yang memiliki dampak besar dalam memberikan pengaruhnya terhadap angka GDP yaitu kebijakan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dalam bidang investasi, ekspor dan impor dalam bidang perdagangan jasa, industri atau agrikultur<sup>46</sup>. Indikator di atas merupakan indikator yang memiliki pengaruh cukup besar dalam peningkatan angka GDP yang dialami oleh

<sup>46</sup> Wayne M. Morrison, 2018, *China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States*. Congressional Research Service. Halaman 12

Tiongkok. Karena peningkatan angka GDP yang dialami oleh Tiongkok di setiap tahunnya secara signifikan, hal ini membuat Tiongkok menjadi salah satu negara yang memiliki angka GDP terbesar. Di bawah ini terdapat data beberapa negara yang memiliki angka GDP terbesar.



NEGARA	2009 (US\$)	NEGARA	2017(US\$)
<b>Amerika Serikat</b>	14.418 Trilyun	<b>Amerika Serikat</b>	19.390 Trilyun
<b>Jepang</b>	5.231 Trilyun	<b>Tiongkok</b>	12.237 Trilyun
<b>Tiongkok</b>	5.109 Trilyun	<b>Jepang</b>	4.827 Trilyun
<b>Jerman</b>	3.418 Trilyun	<b>Jerman</b>	3.677 Trilyun
<b>Prancis</b>	2.690 Trilyun	<b>Prancis</b>	2.582 Trilyun

**Sumber:** Diolah oleh peneliti.

**Gambar 5.3** Data Peringkat GDP Terbesar 2009-2017

Tiongkok pada tahun 2009 berada pada posisi negara tiga teratas yang memiliki jumlah GDP terbesar diantara Jepang dengan Amerika Serikat. Posisi ini pun berubah sangat signifikan antara Tiongkok dengan Jepang. Pada tahun 2017 Tiongkok berhasil melampaui posisi dan juga angka yang dimiliki oleh Jepang. Bahkan perkembangan yang dimiliki oleh Tiongkok pada tahun 2009 sampai 2017 berhasil melampaui perkembangan angka GDP yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang hanya mampu meningkatkan angka GDP nya kurang dari

40%. Peningkatan yang dialami oleh Tiongkok inipun berhasil mengecilkan jarak GDP Tiongkok dengan Amerika Serikat.

### 5.1.2 Angka GNP Tiongkok

Angka GNP atau *Gross National Product* merupakan indikator kedua dalam melihat kondisi ekonomi suatu negara. Terdapat perbedaan faktor – faktor pendukung kenaikan antara GNP dengan GDP. Angka GNP memiliki faktor pendukung dalam peningkatannya seperti faktor pendapatan ekonomi masyarakat domestik Tiongkok, baik itu yang berada di dalam negeri ataupun luar negeri yang dihasilkan dari pendapatan kegiatan ekonomi produksi suatu barang ataupun jasa. Pendapatan masyarakat asing yang berada di Negara Tiongkok tidak termasuk indikator angka GNP. Di bawah ini terdapat data peningkatan angka GNP Tiongkok sebelum dibentuknya kerjasama RCEP dan pasca berlakunya kerjasama RCEP yang diinisiasikan oleh Tiongkok.



Sumber: [www.CEIC.com](http://www.CEIC.com)

**Gambar 5.4** Data GNP Tiongkok

Tiongkok mengalami peningkatan angka GNP setiap tahunnya. Peningkatan inipun dapat dikatakan cukup signifikan jika dilihat dari tahun 2009

sampai 2018. Dalam data *World Bank*, Tiongkok berhasil meningkatkan angka GNP dengan cara meningkatkan produksi kegiatan ekonomi masyarakat domestik Tiongkok baik itu berupa produksi barang ataupun jasa. RCEP memberikan keuntungan yang cukup besar untuk Tiongkok, hal ini dapat dilihat dari Data peningkatan pada angka produksi negara Tiongkok akan disajikan pada sub-bab selanjutnya yang berkaitan dengan ekspor impor. Peningkatan yang terjadi pada angka GNP Tiongkok membuat Tiongkok menjadi negara dengan angka GNP terbesar. Di bawah ini terdapat data perbandingan angka GNP beberapa negara.<sup>47</sup>

**Tabel 5.1** Peringkat GNP Terbesar

Negara	2010 (US\$)	Negara	2017 (US\$)
<b>Tiongkok</b>	6.062.293.192	<b>Tiongkok</b>	13.564.410.584
<b>Amerika Serikat</b>	3.861.314.000	<b>Amerika Serikat</b>	5.025.648.500
<b>Prancis</b>	2.705.365.601	<b>Inggris</b>	2.791.480.325
<b>Inggris</b>	2.456.425.232	<b>India</b>	2.697.305.909
<b>India</b>	1.660.349.976	<b>Prancis</b>	2.647.767.705
<b>Jepang</b>	1.614.441.719	<b>Kanada</b>	1.630.527.439
<b>Kanada</b>	1.581.499.572	<b>Rusia</b>	1.536.005.096
<b>Rusia</b>	1.447.425.232	<b>Jepang</b>	1.297.101.079

**Sumber:** Diolah oleh peneliti.

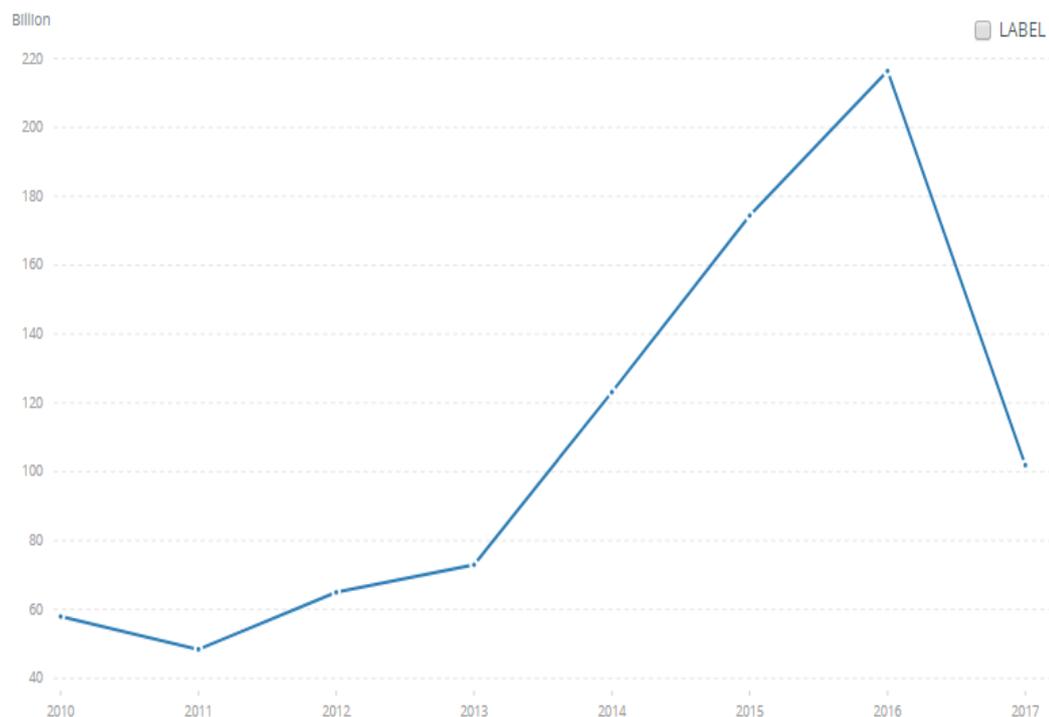
Tiongkok berhasil menjadi negara yang konsisten dalam meningkatkan angka GNPnya. Angka GNP yang dimiliki oleh Tiongkok berhasil meningkat secara signifikan selama tujuh tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010 sampai 2017. Peningkatan angka GNP Tiongkok inipun jauh di atas rata-rata peningkatan GNP negara-negara lainnya. Hal inipun semakin membuat Tiongkok tidak tergeser

<sup>47</sup> CEIC, "Tiongkok Gross National Product" ([www.ceicdata.com/en/indicator/china/gross-national-product](http://www.ceicdata.com/en/indicator/china/gross-national-product))

dalam posisi negara dengan angka GNP terbesar. Angka GNP yang dimiliki oleh Tiongkok dipengaruhi oleh beberapa sektor seperti angka investasi, ekspor, impor dan angka konsumsi. Dibawah ini terdapat penjelasan mengenai peningkatan dari beberapa sektor yang mempengaruhi angka GNP Tiongkok.

### **5.1.3 Angka FDI Tiongkok**

*Foreign Direct Investment* atau FDI merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang terdapat pada kerjasama ekonomi regional salah satunya RCEP. FDI merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan memberikan modal usaha untuk suatu perusahaan yang berasal dari negara lain. Di dalam menjalankan sistem FDI terdapat dua cara kerja yaitu *inward* dan *outward*. *Inward* dalam FDI juga disebut sebagai *inflows* atau suatu bentuk penanaman modal atau investasi yang berasal dari mancanegara yang diberikan ke dalam negeri. Sedangkan *outward* juga disebut sebagai *outflows* atau aliran penanaman modal yang diberikan ke negara lain. Di bawah ini terdapat data FDI *inflows* dan *outflows* yang dimiliki oleh Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir.



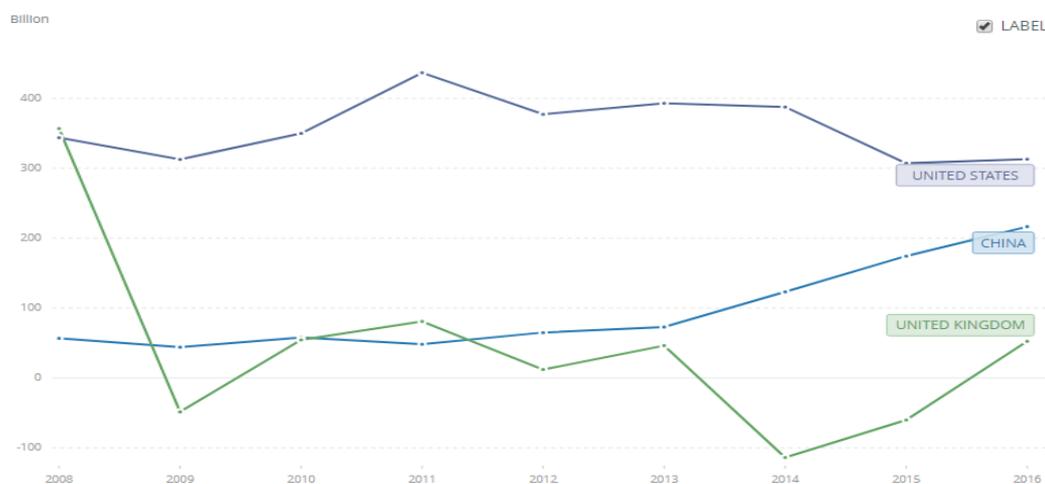
Tahun	Billion US\$	Tahun	Billion US\$
2010	57.954	2014	123.130
2011	48.421	2015	174.391
2012	64.963	2016	216.424
2013	72.971	2017	101.914

Sumber: worldbank.com

**Gambar 5.5** Angka FDI *Outflow* Tiongkok

Tiongkok berhasil meningkatkan angka FDI mereka yang diberikan kepada negara lain. Peningkatan yang terjadi dalam beberapa terakhir ini didukung dari beberapa faktor, seperti kebijakan pemerintah Tiongkok yang berinisiatif untuk membuat perusahaan asal Tiongkok berkembang menjadi *global* serta pemerintah Tiongkok juga memfokuskan agar FDI dapat menghasilkan teknologi, pengetahuan serta brand terkenal. Hal ini akan dapat mendorong terciptanya inovasi dari *brand* yang berasal dari Tiongkok. Tiongkok berhasil menjadi negara dengan angka FDI terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Tiongkok berhasil menggeser posisi Inggris yang sebelumnya menjadi

negara yang memiliki angka FDI terbesar kedua di dunia. Hal ini dapat dilihat dari data tiga negara yang memiliki angka FDI terbesar di dunia.

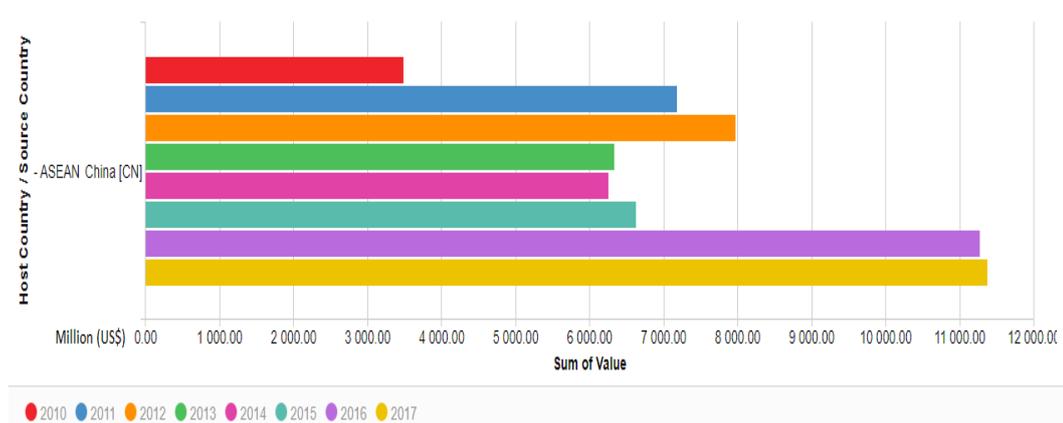


Negara	2008 (US\$)	2016 (US\$)
<b>Amerika Serikat</b>	343.483 Milyar	312.975 Milyar
<b>Tiongkok</b>	56.742 Milyar	216.424 Milyar
<b>Inggris</b>	356.696 Milyar	52.418 Milyar

Sumber : diolah dari [www.Worldbank.com](http://www.Worldbank.com)

**Gambar 5.6** Angka FDI *Outflow* Tiga Negara Terbesar

RCEP memiliki peran penting dalam peningkatan FDI Tiongkok. Tiongkok berhasil menjadi negara yang memiliki FDI terbesar kedua dan peningkatan yang dicapai oleh Tiongkok inipun lebih signifikan dari pada peningkatan yang dialami oleh Amerika Serikat. Kerjasama RCEP menyumbang cukup banyak dalam FDI *Outflows* Tiongkok. Hal ini dapat dilihat dari data angka investasi Tiongkok ke negara-negara di ASEAN. Dibawah ini terdapat data investasi yang diberikan oleh Tiongkok kepada beberapa negara anggota RCEP.



Sumber : [www.data.aseanstats.org](http://www.data.aseanstats.org)

**Gambar 5.7** Angka Investasi Tiongkok ke ASEAN

**Table 5.2** Angka Investasi Tiongkok dengan Jepang

	Inward	Outward
2010	7.252	314
2011	12.649	109
2012	13.479	72
2013	9.104	140
2014	10.889	767
2015	10.001	636
2016	9.534	92
2017	11.122	987
	Milyar US\$	Milyar US\$

Sumber: [www.jetro.go.jp](http://www.jetro.go.jp)

Data di atas diambil dari *proxy* negara-negara anggota RCEP yang diambil menjadi sampel. Keberadaan RCEP berhasil meningkatkan angka FDI Tiongkok yang diberikan kepada negara-negara ASEAN. Investasi yang diberikan oleh Tiongkok pun terdiri dari macam-macam sektor ,seperti agrikultur, manufaktur, transportasi, informasi & komunikasi, infrastruktur dan jasa professional atau peneliti. Angka investasi yang diberikan oleh Tiongkok kepada ASEAN pun membuat Tiongkok menjadi negara terbesar yang memberikan investasi kepada ASEAN. Pada tahun 2010, Tiongkok menduduki peringkat ketiga dibawah Inggris dan Amerika Serikat yang memberikan investasi terbanyak kepada negara-negara ASEAN. Hal inipun berubah pada tahun 2017, dimana Tiongkok berhasil

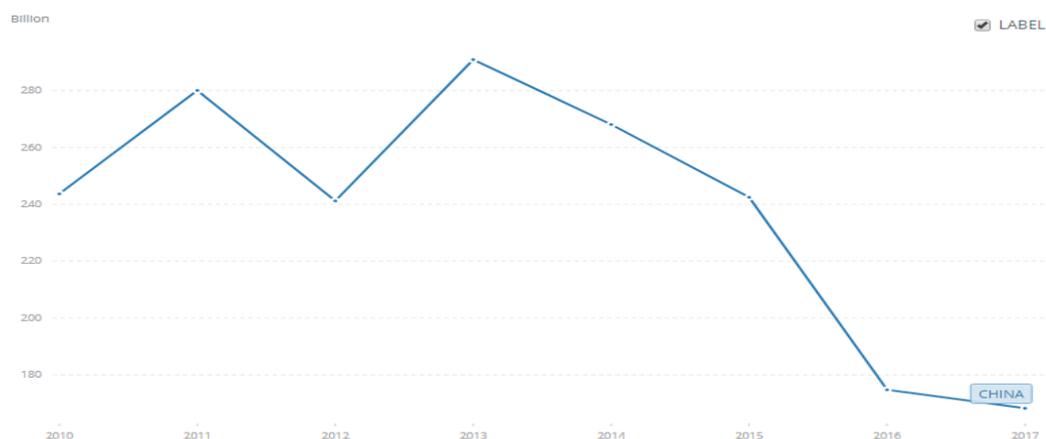
menjadi negara yang paling banyak memberikan investasi kepada ASEAN dan menggosur hegemoni investasi Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Hal ini dapat dilihat dari data angka FDI ketiga negara tersebut.

**Table 5.3** Peringkat Investasi dengan ASEAN

Negara	2010 (US\$)	2017 (US\$)
<b>China</b>	3.448 Milyar	11.370 Milyar
<b>Amerika Serikat</b>	13.682 Milyar	3.085 Milyar
<b>Inggris</b>	5.482 Milyar	4.322 Milyar

**Sumber:** Diolah oleh peneliti dari [www.data.aseanstats.org](http://www.data.aseanstats.org)

Peningkatan yang terjadi dari angka FDI *outflows* yang dimiliki oleh Tiongkok berbanding terbalik dengan angka FDI *inflows* yang dimiliki oleh Tiongkok. Angka investasi yang dari negara lain ke Tiongkok tercatat hampir mengalami penurunan setiap tahunnya. Di bawah ini terdapat data angka FDI *inflows* Tiongkok dalam beberapa tahun belakangan ini.



Tahun	Billion US\$	Tahun	Billion US\$
2010	243.703	2014	268.097
2011	280.072	2015	242.489
2012	241.214	2016	174.750
2013	290.928	2017	168.224

**Sumber:** diolah dari [www.Worldbank.com](http://www.Worldbank.com)

**Gambar 5.8** Angka FDI *Intflow* Tiongkok

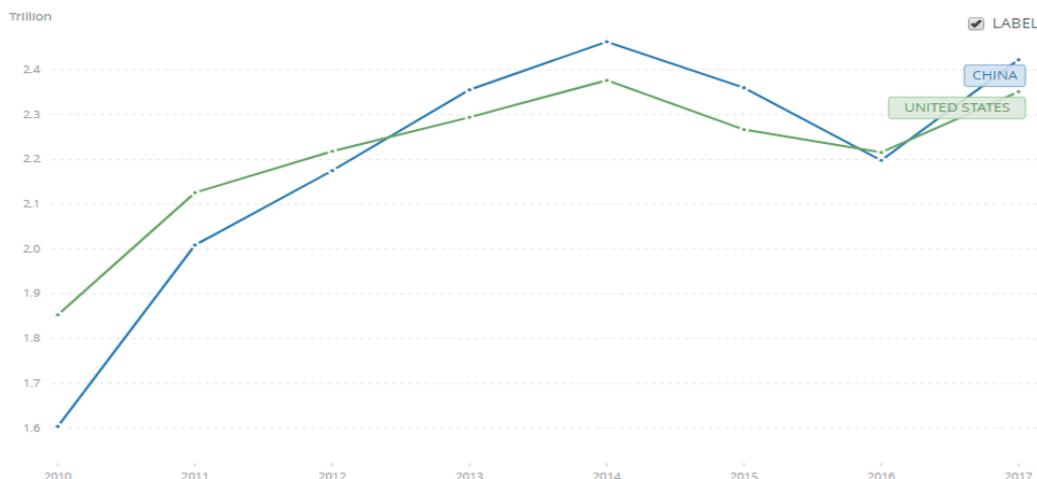
Angka investasi yang masuk ke negara Tiongkok jika dilihat dari data di atas hampir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini berbanding terbalik dari angka FDI *outflows* Tiongkok. Penurunan ini disebabkan karena beberapa negara yang berkerjasama dengan Tiongkok dalam bidang investasi hanya menjadikan Tiongkok sebagai sumber yang memberikan investasi kepada negara tersebut dan hanya beberapa negara saja yang menjadikan Tiongkok sebagai tempat untuk mereka berinvestasi. Bahkan di ASEAN hanya Singapura yang dominan untuk berinvestasi ke negara Tiongkok.<sup>48</sup>

#### **5.1.4 Angka Ekspor Tiongkok**

Keberhasilan Tiongkok dalam mereformasi kebijakan ekonomi dengan menggunakan liberalisasi ekonomi bukan hanya membawa peningkatan di bidang investasi saja. Hal ini juga memberikan dampak yang sangat bagus dalam bidang perdagangan, khususnya ekspor dan impor. Angka ekspor Tiongkok merupakan salah satu negara yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal inipun berhasil membuat Tiongkok menjadi negara dengan angka Ekspor terbesar tepatnya sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 dan berhasil mengalahkan angka yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang menjadi negara dengan angka ekspor terbesar sejak tiga puluh dekade sebelumnya hingga tahun 2013. Hal ini dapat dilihat dari gambar perbandingan berikut ini.

---

<sup>48</sup> Wayne M. Morrison, 2018, *China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States*. Congressional Research Service. Halaman 15



Negara	2010 (US\$)	2017 (US\$)
<b>Tiongkok</b>	1.604 Triliun	2.423 Triliun
<b>Amerika Serikat</b>	1.853 Triliun	2.351 Triliun

Sumber : [www.worldbank.com](http://www.worldbank.com)

. **Gambar 5.9** Angka Perbandingan Ekspor Tiongkok Dengan Amerika

Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan perdagangan dengan beberapa negara yang menjalin kerjasama khususnya negara-negara ASEAN. Tiongkok menjadi negara utama dalam perdagangan dengan ASEAN. Hal inipun menyebabkan angka ekspor antara Tiongkok dengan ASEAN selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2011 sampai 2017. Tiongkok berhasil mencapai angka pendapatan ekspor yang tinggi. Data di bawah ini menunjukkan angka Ekspor Impor antara Tiongkok dengan beberapa negara anggota RCEP

**Tabel 5.4 Ekspor Impor Tiongkok dengan Jepang**

	Ekspor	Impor
<b>2010</b>	149.086.369	152.800.714
<b>2011</b>	161.467.319	183.487.439
<b>2012</b>	144.686.177	189.018.794
<b>2013</b>	129.851.439	182.191.683
<b>2014</b>	127.105.265	182.071.443
<b>2015</b>	109.265.900	160.674.449
<b>2016</b>	113.874.305	156.443.992
<b>2017</b>	132.650.750	164.255.540

Sumber: [www.jetro.go.jp](http://www.jetro.go.jp)



Negara	2012 (US\$)	2017 (US\$)
Ekspor Tiongkok ke Asean	176,8 Milyar	254,5 Milyar
Ekspor Asean ke Tiongkok	142,5 Milyar	186,5 Milyar

Sumber: [www.data.aseanstat.org](http://www.data.aseanstat.org)

**Gambar 5.10** Angka Ekspor Tiongkok-ASEAN

Tiongkok berhasil meningkatkan intensitas perdagangannya dengan ASEAN secara signifikan. Hal inipun membuat angka pendapatan ekspor Tiongkok yang berasal dari ASEAN mengungguli angka pendapatan negara eksportir lainnya, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Dengan peningkatan yang didapatkan inipun membuat Tiongkok mendominasi pasar di negara-negara ASEAN. Hal ini juga membuat Tiongkok menjadi pasar utama bagi negara-negara ASEAN dan juga sebaliknya. Di bawah ini terdapat data rangkuman pendapatan ekspor Amerika Serikat dan Jepang ke ASEAN.

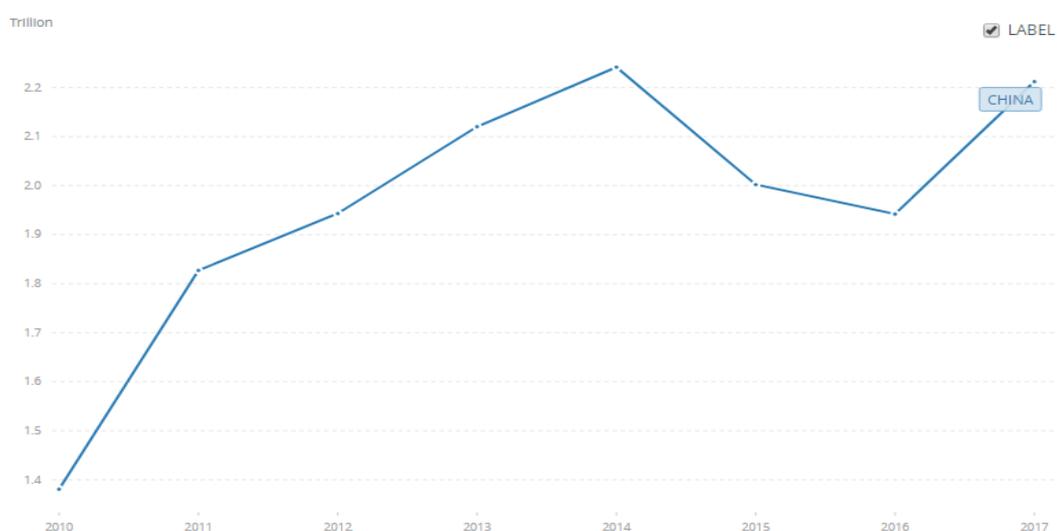
**Tabel 5.5** Pendapatan Ekspor Terbesar dengan ASEAN

Negara	2012 (US\$)	2017 (US\$)
<b>Tiongkok</b>	176,8 Milyar	254,5 Milyar
<b>Amerika Serikat</b>	92,0 Milyar Milyar	91,60 Milyar
<b>Jepang</b>	136,5 Milyar	113,5 Milyar

Sumber: [www.data.aseanstat.org](http://www.data.aseanstat.org)

### 5.1.5 Angka Impor Tiongkok

Hampir sama dengan angka ekspor Tiongkok, angka impor Tiongkok mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2010 sampai 2017. Tiongkok berhasil menjadi pusat perdagangan bagi penjualan barang atau pun jasa dari negara-negara lain. Peningkatan ini menyumbang angka yang cukup besar pada GDP Tiongkok. Data di bawah ini merupakan terdapat data angka Impor Tiongkok.



Negara	2010 (US\$)	2017 (US\$)
<b>Tiongkok</b>	1.381 Triliun	2.212 Triliun

Sumber: [www.worldbank.com](http://www.worldbank.com)

**Gambar 5.11** Angka Impor Tiongkok

Tiongkok berhasil meningkatkan angka impor mereka dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh beberapa kerjasama yang Tiongkok lakukan dalam bidang perdagangan. Hal itu mendorong pengurangan hambatan-hambatan bagi negara-negara yang melakukan impor ke Tiongkok. Tiongkok juga berhasil dalam meningkatkan intensitas impor mereka dengan negara-negara ASEAN dan hal ini jugalah yang mampu memberikan sumbangan besar bagi pendapat impor keseluruhan yang dimiliki oleh Tiongkok.

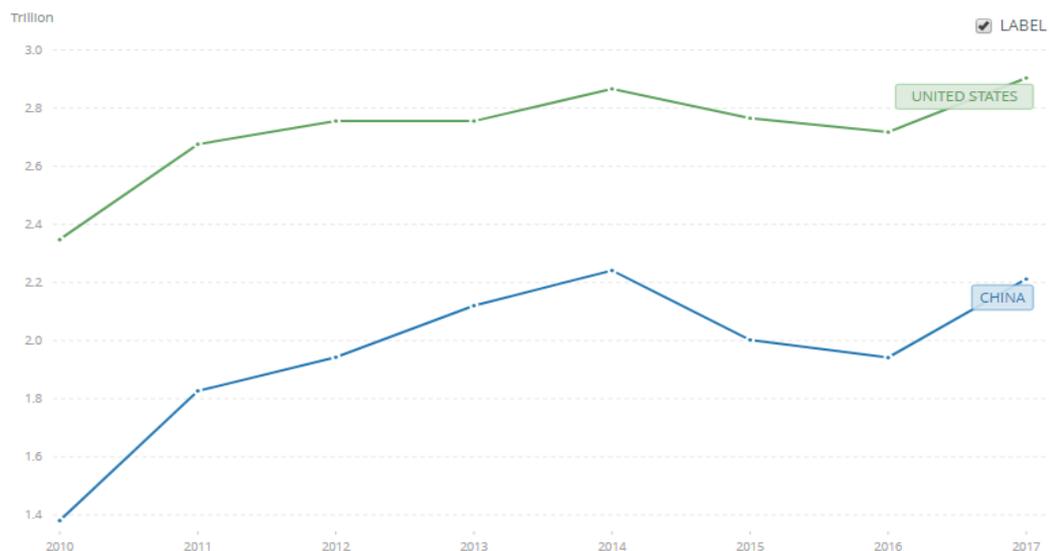
Angka impor Tiongkok dengan ASEAN dapat dilihat di data GAMBAR 5.10. Tiongkok juga menjadi pasar utama bagi negara-negara ASEAN untuk menjual barang ataupun jasa mereka. Hal ini membuat Tiongkok menjadi dominan dibandingkan para pesaingnya dalam menguasai pasar ASEAN. Data di bawah ini merupakan data tiga negara dengan angka impor tertinggi dengan ASEAN.

**Tabel 5.6** Angka Impor Terbesar dengan ASEAN

Negara	2012 (US\$)	2017 (US\$)
<b>Tiongkok</b>	142,5 Milyar	186,5 Milyar
<b>Jepang</b>	127,9 Milyar	105,8 Milyar
<b>Amerika Serikat</b>	107,8 Milyar	142,7 Milyar

**Sumber:** [www.data.aseanstat.org](http://www.data.aseanstat.org)

Tiongkok menjadi negara yang memiliki angka peningkatan impor terbesar dalam beberapa tahun terakhir ini. Peningkatan yang dialami oleh Tiongkok inipun berhasil mengalahkan dominasi Amerika Serikat yang memiliki angka impor tertinggi dari seluruh negara, walaupun secara angka keseluruhan Tiongkok masih belum bisa mengungguli Amerika Serikat yang masih menduduki posisi teratas. Di bawah ini terdapat data perbandingan peningkatan angka Impor Tiongkok dan Amerika Serikat.



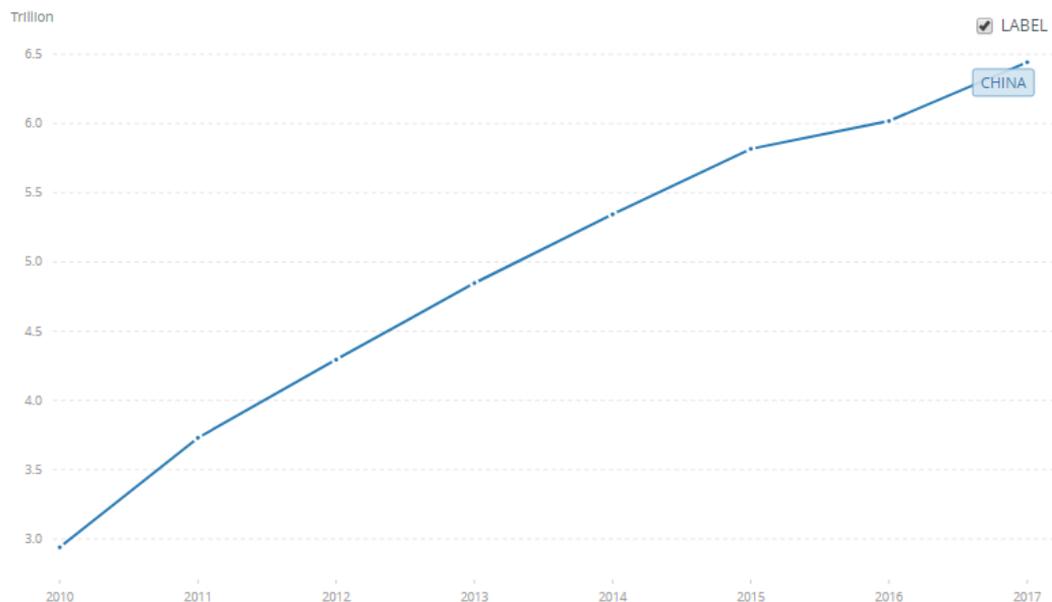
Negara	2010 (US\$)	2017(US\$)
<b>Tiongkok</b>	1.381 Triliun	2.212 Triliun
<b>Amerika Serikat</b>	2.348 Triliun	2.903 Triliun

Sumber: [www.worldbank.com](http://www.worldbank.com)

**Gambar 5.12** Angka Impor Tiongkok dan Amerika Serikat

### 5.1.6 Angka Konsumsi Tiongkok

Dari pemaparan mengenai sektor-sektor ekonomi yang menjadi sumber pendapatan Tiongkok seperti investas serta ekspor dan impor, angka konsumsi Tiongkok juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk serta pajak penghasilan. Jumlah penduduk yang begitu besar memiliki dampak yang cukup besar terhadap angka konsumsi negara Tiongkok. dibawah ini terdapat data angka konsumsi Tiongkok dari tahun 2010 sampai tahun 2017.



Tahun	Trilyun US\$	Tahun	Trilyun US\$
2010	2.939	2014	5.344
2011	3.730	2015	5.817
2012	4.295	2016	6.019
2013	4.847	2017	6.433

**Sumber:** [www.worldbank.com](http://www.worldbank.com)

**Gambar 5.13** Angka Konsumsi Tiongkok

Angka konsumsi yang dimiliki Tiongkok mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dilihat dari data di atas. Angka konsumsi Tiongkok tercatat menyumbang sebesar 53% dari angka GNP yang dimiliki oleh Tiongkok.<sup>49</sup> Peningkatan angka konsumsi Tiongkok ini tentu dampak dari terjadinya peningkatan pada angka pendapatan Tiongkok dari Ekspor, Impor serta tabungan yang dihasilkan dari kegiatan Investasi Tiongkok.

<sup>49</sup> WorldBank "Consumption", ([/data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TOTL.ZS?end=2017&locations=CN-US-GB-FR&start=2010](https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TOTL.ZS?end=2017&locations=CN-US-GB-FR&start=2010)) 10 April 2019

## **5.2 Motif Kepentingan Tiongkok Dalam Kerjasama RCEP**

Perwujudan kerjasama regional memiliki kepentingan yang ingin dicapai. Secara sederhana kepentingan nasional dapat diartikan ialah suatu tujuan, alasan, ataupun faktor pendorong suatu negara melakukan atau mengeluarkan suatu kebijakan untuk mendapatkan keuntungan bagi negara tersebut.<sup>50</sup> Dari pernyataan tersebut bisa diartikan bahwa keikutsertaan Tiongkok dalam RCEP memiliki tujuan, alasan, atau faktor pendorong untuk mendapatkan keuntungan.

Kerjasama regional, khususnya dalam bidang ekonomi, saat ini telah dijadikan alat diplomasi atau kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Tujuan itulah yang bisa diartikan sebagai motif atau faktor pendorong terbentuknya kepentingan nasional yang dimiliki oleh Tiongkok dalam menginisiasi kerjasama RCEP.

Untuk menghubungkan motif kepentingan yang dimiliki oleh Tiongkok dalam menginisiasikan kerjasama RCEP maka sub bab ini akan dibagikan menjadi beberapa poin terkait motif kepentingan apa saja yang dimiliki oleh Tiongkok dalam kerjasama RCEP. Dalam sub bab ini terdiri dari tiga poin yaitu: motif kepentingan ekonomi, politik dan rivalitas Tiongkok – Amerika Serikat.

### **5.2.1 Motif Kepentingan Ekonomi**

Motif kepentingan ekonomi dalam kerjasama regional menjadi motif kepentingan yang tidak bisa dilepaskan dari negara-negara anggota kerjasama tersebut. Begitu juga dalam kerjasama RCEP yang diinisiasikan oleh Tiongkok. Negara-negara anggota RCEP memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti negara-negara

---

<sup>50</sup> Jack C. Plano and Roy Olton, 1988, *The International Relation Dictionary*(Fourth Edition), Western Michigan University. Halaman 11

di ASEAN. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat yang dimiliki oleh Tiongkok dalam menginisiasi kerjasama RCEP.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa motif kepentingan ekonomi yang dimiliki oleh Tiongkok dalam menginisiasi kerjasama RCEP. Kepentingan ekonomi tersebut mendorong Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama RCEP. Beberapa faktor yang mendasari kepentingan ekonomi yang dimiliki oleh Tiongkok ialah keberadaan sumber daya alam yang melimpah dari beberapa negara anggota RCEP, kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki negara anggota RCEP, kemudian selanjutnya untuk memperoleh dan meningkatkan angka investasi dengan negara anggota RCEP, dan yang terakhir yaitu untuk memperluas jaringan perdagangan Tiongkok dalam memasarkan barang-barang produksi yang dimiliki oleh Tiongkok. Pada paragraf selanjutnya akan dijelaskan mengenai beberapa faktor yang sudah disebutkan di atas.

Kepentingan ekonomi yang dimiliki Tiongkok dalam kerjasama RCEP dari faktor sumber daya alam dikemukakan oleh Yang Jiang dalam buku yang berjudul *China's Policy Making for Regional Economic Cooperation*.<sup>51</sup> Dalam buku tersebut Yang Jiang menyatakan bahwa yang mendorong Tiongkok untuk menginisiasikan kerjasama regional, yang salah satunya kerjasama RCEP, yaitu memiliki kepentingan untuk memperoleh hasil sumber daya alam yang stabil pada beberapa negara anggota RCEP, di antaranya negara di ASEAN. Jenis-jenis hasil sumber daya alam yang diinginkan oleh Tiongkok yaitu di antaranya produk mineral, hasil olahan perkebunan karet, kayu, dan minyak mentah. Bukan hanya ketersediaan barang yang stabil yang mendorong kepentingan Tiongkok.

---

<sup>51</sup>Yang Jiang, 2013, *China's Policymaking for Regional Economic Cooperation*, Palgrave Macmillan.

Kerjasama RCEP ini juga digunakan Tiongkok untuk membuat barang-barang hasil sumber daya alam tersebut menjadi memiliki harga yang lebih murah untuk diimpor ke Tiongkok.<sup>52</sup>

Barang-barang yang berasal dari sumber daya alam beberapa negara anggota RCEP ini kemudian digunakan oleh Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan mereka sebagai negara Industri. Kerjasama RCEP berhasil membuat peningkatan pada angka impor Tiongkok yang berasal dari produk sumber daya alam diantaranya dengan negara-negara ASEAN. Salah satu produk sumber daya alam yang berhasil memberikan dampak peningkatan impor yaitu bahan mineral dan minyak bumi. Peningkatan yang terjadi dapat dilihat dari angka awal pada tahun 2012 sebesar 21,7 milyar US\$ dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 22.5 milyar US\$.<sup>53</sup>

Motif kepentingan ekonomi yang kedua yaitu didasari oleh faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara-negara anggota RCEP. Faktor ini juga disebutkan oleh John Ravenhill dalam jurnalnya yang berjudul *The Political Economy of an "Asian" Mega FTA The Regional Comprehensive Economic Partnership*.<sup>54</sup> Di dalam jurnalnya John Ravenhill mengatakan bahwa sumber daya manusia sebagai salah satu faktor lain yang mendorong Tiongkok dalam menginisiasikan kerjasama RCEP. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sumber daya manusia yang hampir berjumlah lebih dari tiga milyar penduduk atau sekitar 45% dari total keseluruhan penduduk dunia. Hal ini dikatakan oleh John Ravenhill bahwa keunggulan pada jumlah sumber daya manusia ini dapat meningkatkan

---

<sup>52</sup> Ibid. Halaman 35-36

<sup>53</sup> ASEAN.STATS "Trade in Goods" (<https://data.aseanstats.org/dashboard/imts.hs2>)

<sup>54</sup> John Ravenhill, 2016, *The Political Economy of an "Asian" Mega-FTA The Regional Comprehensive Economic Partnership*. The University of California Press's. vol. 56, no. 6.

angka perdagangan dalam bidang jasa yang dimiliki oleh Tiongkok. Hal ini dibuktikan dari peningkatan pendapatan pada bidang perdagangan jasa yang dimiliki oleh Tiongkok dari tahun 2010 yang hanya sebesar 117.532 milyar US\$ meningkat pada tahun 2017 sebesar 206.453 milyar US\$.<sup>55</sup> Peningkatan pada angka pendapatan perdagangan jasa Tiongkok tersebut dilakukan oleh Tiongkok dalam upayanya pada kerjasama RCEP yaitu dengan mengadopsi atau membentuk kelompok kerja pada perdagangan jasa, yang bertujuan untuk memaksimalkan dibidang perdagangan jasa antar anggota RCEP.

Faktor yang ketiga yaitu untuk memudahkan jalur masuk investasi baik itu investasi yang masuk ke dalam Tiongkok ataupun investasi yang diberikan oleh Tiongkok untuk negara lain. Bukan hanya untuk memudahkan jalur masuk investasi, Tiongkok menggunakan kerjasama RCEP ini juga untuk menguasai atau memperbesar *power* mereka di suatu negara di antaranya negara-negara di ASEAN. Kerjasama RCEP dapat memberikan keuntungan yang lebih maksimal bagi negara-negara yang memiliki kekuatan lebih, salah satunya kekuatan finansial.<sup>56</sup> Tiongkok saat ini menjadi negara yang memiliki angka investasi terbesar di beberapa negara anggota RCEP, di antaranya yaitu negara-negara di ASEAN. Hal ini didukung oleh data ASEAN stat yang mengatakan bahwa pada tahun 2017 Tiongkok menjadi negara yang memiliki angka investasi di negara-negara ASEAN yaitu sebesar 11.370 Milyar US\$.<sup>57</sup>

Upaya untuk mempermudah masuknya investasi di setiap negara anggota RCEP diterapkan dengan dibentuknya kelompok kerja dalam bidang investasi.

---

<sup>55</sup> Ibid. halaman 1086

<sup>56</sup> Rafael Leak-Arcas, 2013, *China and the Regional Comprehensive Economic Partnership*. Queen Mary University of London. Vol. 35. No. 2. Halaman 1010

<sup>57</sup> Data.aseanstats “*Foreign Direct Investment*”, ([data.aseanstats.org/fdi-by-hosts-and-sources](http://data.aseanstats.org/fdi-by-hosts-and-sources)) 10 April 2019.

kelompok kerja investasi pada RCEP bertujuan untuk membangun ekosistem investasi yang sehat dari berbagai negara anggota RCEP. Upaya yang dilakukan Tiongkok dalam menginisiasi kerjasama RCEP berhasil memberikan dampak positif bagi angka FDI Tiongkok yang berhasil meningkat sejak tahun 2010 sampai 2017.

Faktor yang terakhir adalah untuk memperluas dan meningkatkan jaringan perdagangan Tiongkok untuk memasarkan barang produksi Tiongkok ke negara-negara anggota RCEP. Tiongkok melihat peluang besar yang dimiliki oleh negara anggota RCEP dalam meningkatkan angka perdagangan yang dimiliki oleh Tiongkok. Faktor ini juga yang dapat membuat Tiongkok semakin memiliki *power* lebih dengan beberapa negara di antaranya negara-negara ASEAN. Upaya Tiongkok ini dapat dilihat dari adanya kelompok kerjasama di bidang perdagangan yang dimiliki oleh kerjasama RCEP. Hal ini senada dengan asumsi dalam jurnal John Ravenhill yang menyatakan bahwa kerjasama sebesar RCEP ini dapat semakin meningkatkan kekuatan ekonomi terutama sektor perdagangan yang dimiliki Tiongkok. Peluang ini dilihat dari negara-negara anggota RCEP memiliki kebutuhan yang cukup besar dari barang-barang yang diproduksi oleh Tiongkok.<sup>58</sup>

Jika dilihat dari faktor terakhir, upaya Tiongkok untuk menginisiasikan kerjasama RCEP merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan jaringan perdagangan mereka dan memaksimalkan angka pendapatan pada sektor perdagangan dapat dikatakan cukup berhasil dengan ditandai adanya peningkatan dalam angka ekspor Tiongkok khususnya dengan beberapa negara di ASEAN.

---

<sup>58</sup> John Ravenhill, 2016, *The Political Economy of an "Asian" Mega-FTA The Regional Comprehensive Economic Partnership*. The University of California Press's. vol. 56, no. 6. halaman 1081

Hal ini dapat dilihat dari data di gambar 5.10. Berdasarkan keempat faktor yang sudah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Tiongkok memiliki kepentingan ekonomi yang ingin dicapai dalam upaya menginisiasi kerjasama RCEP. Hal itu dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi negara Tiongkok.

### **5.2.2 Motif Kepentingan Politik**

Motif kepentingan politik tidak bisa dipisahkan dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh aktor internasional. Motif kepentingan politik ini dapat diartikan ialah sebagai tujuan atau dorongan yang dimiliki oleh suatu aktor yang bersifat tersirat dalam melakukan suatu tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh suatu aktor tersebut biasanya untuk mempertahankan kedudukan atau kekuasaan mereka dan juga untuk mendapatkan suatu posisi tertentu dalam jaringan internasional. Hal ini juga yang dilakukan oleh Tiongkok saat menginisiasi kerjasama RCEP.

Motif kepentingan politik dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tidak bisa dipisahkan dalam sebuah interaksi, termasuk interaksi yang terjadi antar negara satu dengan yang lainnya. Kerjasama regional ialah salah satu bentuk interaksinya. Indikator motif kepentingan politik dalam suatu kerjasama regional khususnya dalam bidang ekonomi menurut jurnal yang ditulis oleh William Zartman, James Paul dan John Entelis yang berjudul *An Economic Indicator of Socio Political Unrest* ialah digunakan untuk mempertahankan kedudukan dalam dunia internasional, mendapatkan suatu *power* atau posisi yang kuat dalam lingkungan global.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> I. William Zartman, James A. Paul and John P. Entelis, 2014, *An Economic Indicator of Socio Political Unrest*, Cambridge University Press. Vol. 2. No. 4. Halaman 293

Dalam upaya Tiongkok untuk menginisiasi kerjasama RCEP terdapat beberapa faktor atau dorongan. Pertama yaitu faktor untuk memperkuat citra sebagai negara *super power* dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan Tiongkok tengah mengalami peningkatan dalam kekuatan angka perekonomian mereka. Hal ini berbeda dengan beberapa negara yang sudah lebih lama memiliki kekuatan besar pada bidang ekonomi. Beberapa negara yang sudah menjadi negara *super power* sebelum Tiongkok ialah Jepang dan Amerika Serikat.

oleh karena faktor ini Tiongkok ingin memperkuat citra mereka sebagai negara *super power*. Dalam membentuk citra negara *super power* Tiongkok harus secara signifikan untuk mempengaruhi ekonomi dunia, harus cukup dinamis untuk berkontribusi secara bermakna dalam pertumbuhan ekonomi global, serta harus terbuka untuk perdagangan dan aliran modal agar memiliki dampak besar bagi negara lain. Ketiga hal tersebut yang menjadi dorongan Tiongkok dalam menginisiasi kerjasama RCEP Tiongkok.<sup>60</sup>

Faktor pendorong yang kedua dari kepentingan politik Tiongkok dalam kerjasama RCEP ialah untuk menguasai bidang ekonomi di antaranya sektor perdagangan barang dan jasa, dan, sektor investasi. Faktor ini juga disebutkan oleh Yang Jiang dalam bukunya yang berjudul *China's Policymaking for Regional Economic Cooperation*. Kepentingan Tiongkok dalam kerjasama RCEP ialah suatu upaya untuk menguasai bidang ekonomi di beberapa sektor. Hal ini dikarenakan dalam beberapa sektor tersebut terdapat hegemoni dari suatu negara dalam kurun waktu yang cukup lama.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Rafael Leak-Arcas, 2013, *China and the Regional Comprehensive Economic Partnership*. Queen Mary University of London. Vol. 35. No, 2. Halaman 1009

<sup>61</sup> Yang Jiang, 2013, *China's Policymaking for Regional Economic Cooperation*, Palgrave Macmillan. Halaman 91

Salah satu sektor ekonomi yang mengalami hegemoni oleh satu negara dalam jangka waktu yang cukup lama ialah sektor ekspor impor dan investasi. Sektor ekspor dan impor sudah dikuasai oleh negara besar seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa seperti Jerman, Perancis, dan Inggris. Keempat negara tersebutpun sudah menghegemoni pasar ekspor dan impor sejak tahun 1970an. Sementara di sektor investasi sudah dikuasai oleh Amerika Serikat dan Inggris sejak tahun 1970an.<sup>62</sup>

Kepentingan Tiongkok untuk menguasai beberapa sektor ekonomi sudah disebutkan oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok dalam dokumen kepentingan nasional Tiongkok di bidang kerjasama ekonomi. (Ada pada sub bab 4.3) yaitu pada kepentingan Tiongkok nomer 4 yang menyebutkan bahwa Tiongkok ingin memimpin dan memperbaiki tatanan ekonomi pasar internasional. Berdasarkan faktor yang dimiliki oleh Tiongkok itu bisa disimpulkan bahwa Tiongkok berhasil melakukan pergeseran hegemoni di beberapa sektor saat kerjasama RCEP ini sudah diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari peringkat negara teratas dalam sektor ekspor dan investasi dengan beberapa negara anggota RCEP. Tiongkok berhasil menjadi negara dengan angka terbesar yang memberikan investasi dengan negara-negara ASEAN pada tahun 2017. Tiongkok berhasil mencapai posisi ini yang sebelumnya dikuasai oleh Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini dapat dilihat di tabel 5.2.

Faktor selanjutnya yaitu untuk mempertahankan hegemoni pada sektor perdagangan khususnya dengan negara-negara anggota RCEP. Yang Jiang juga menyebutkan bahwa kepentingan politik Tiongkok dalam RCEP ialah untuk

---

<sup>62</sup> WorldBank "Ekspor, Impor dan FDI", ([data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.CD.WD?contextual=](http://data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.CD.WD?contextual=)) 10 April 2019

mempertahankan eksistensi Tiongkok dalam sektor perdagangan, khususnya dengan negara ASEAN.<sup>63</sup> Tiongkok memang sudah menguasai pasar ekspor dengan ASEAN dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2012, Tiongkok sudah menjadi rekan utama bagi negara-negara ASEAN dan sudah menghasilkan sekitar 176 Milyar US\$.<sup>64</sup> Jumlah ini dua kali lipat lebih besar dibandingkan pesaingnya, yaitu Jepang dan Amerika Serikat. Pada tahun 2017, nilai ekspor Tiongkok berhasil meningkat menjadi 254 Milyar US\$ dan jumlahnya tiga kali lipat lebih besar dibandingkan pesaingnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepentingan Tiongkok berhasil untuk mempertahankan hegemoni Tiongkok dalam sektor ekspor impor dengan negara-negara ASEAN.

Faktor yang terakhir yaitu adanya kepentingan yang dimiliki oleh Tiongkok untuk membuat negara-negara anggota RCEP menjadi bergantung secara ekonomi dengan Tiongkok. Menurut Rafael Leal Arcas dalam jurnalnya yang berjudul *China and the Regional Comprehensive Economic Partnership* menyebutkan faktor ini lebih dikhususkan untuk negara-negara berkembang yang ada dikerjasama RCEP.<sup>65</sup> Beberapa sektor yang dapat membuat negara-negara berkembang menjadi bergantung kepada Tiongkok ialah seperti sektor ekspor impor, sektor investasi, dan sektor finansial khususnya hutang luar negeri.

### **5.2.3 Motif Kepentingan Rivalitas Tiongkok-Amerika Serikat**

Dalam penelitian ini, motif kepentingan nasional Tiongkok dalam menginisiasi kerjasama RCEP terlihat lebih kuat dan dominan pada motif

---

<sup>63</sup> Yang Jiang, 2013, *China's Policymaking for Regional Economic Cooperation*, Palgrave Macmillan. Halaman 13

<sup>64</sup> ASEAN, "ekspor dengan Tiongkok", ([www.data.aseanstat.org/](http://www.data.aseanstat.org/)) diakses pada tanggal 10 april 2019.

<sup>65</sup> Rafael Leak-Arcas, 2013, *China and the Regional Comprehensive Economic Partnership*. Queen Mary University of London. Vol. 35. No, 2. Halaman 1011.

kepentingan politik. Dalam motif kepentingan politik ini terdapat suatu kepentingan nasional yang ingin dicapai yang juga berkaitan dengan rivalitas yang dimiliki oleh Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Salah satu faktor yang mendorong kepentingan Tiongkok ialah untuk mengubah hegemoni di bidang ekonomi dalam beberapa sektor yang selama ini dikuasai oleh Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir.

Rivalitas antara Tiongkok dengan Amerika Serikat ini bermula dari kebijakan Amerika Serikat yang membentuk kerjasama antar regional dengan beberapa negara di benua Amerika dan Asia Pasifik. Kerjasama itu bernama TPP atau *Trans Pacific Partnership*. Kerjasama yang diinisiasi oleh Amerika Serikat tersebut membuat Tiongkok merasa terancam. Hal ini juga dijelaskan dalam jurnal yang ditulis oleh Jagannath P. Panda yang berjudul *Factoring the RCEP and the TPP: China, India and the Politics Regional Integration*.<sup>66</sup> Dalam jurnal yang ditulis oleh Jagannath tersebut terdapat beberapa alasan yang membuat Tiongkok merasa terancam atas kerjasama yang diinisiasi oleh Amerika Serikat yaitu:

Pertama, Tiongkok merasa terancam karena kerjasama sama TPP dinilai untuk meningkatkan kondisi domestik Amerika Serikat dan meningkatkan pasar ekspor di Asia Pasifik. Kedua, yaitu Tiongkok merasa terancam karena kerjasama TPP dijadikan Amerika Serikat untuk membubarkan persatuan dan etos kerjasama ekonomi Asia Timur dan akan membuat terobosan baru dengan Asia Timur. Terakhir, Tiongkok merasa terancam atas kehadiran Amerika Serikat di Asia yang

---

<sup>66</sup> Jagannath P. Panda, 2014, *Factoring the RCEP and the TPP: China, india and the Politics of Regional Integration*, Publisher: Roulledge.

dimana diasumsikan oleh Tiongkok ialah suatu upaya dalam menahan kebangkitan Tiongkok dan untuk membatasi supremasi ekonomi yang dimiliki oleh Tiongkok.<sup>67</sup> Dari kekhawatiran yang dirasakan Tiongkok itu, maka Tiongkok membentuk suatu kerjasama yang hampir serupa dengan TPP, yaitu kerjasama RCEP.

Dalam upaya untuk merubah hegemoni Amerika Serikat, Tiongkok membuat kerjasama RCEP berbeda dengan kerjasama TPP. Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang dimiliki oleh kerjasama RCEP yang berdasarkan pada keputusan yang diambil secara bersama dan dari hasil negosiasi antar negara anggota. Hal ini berbeda dengan peraturan atau keputusan yang terdapat pada kerjasama TPP yang harus sejalan dengan keputusan Amerika Serikat. Hal ini menandakan bahwa RCEP lebih bersifat demokratis bagi anggota-anggotanya. Dari hasil peraturan yang dinegosiasikan oleh antar negara anggota RCEP, dapat dikatakan bahwa kerjasama ini berupaya untuk saling memberikan keuntungan bagi setiap negara anggota, khususnya Tiongkok.<sup>68</sup>

Jika dilihat dari motif kepentingan politik Tiongkok pada kerjasama RCEP yaitu untuk menggusur hegemoni Amerika Serikat pada bidang ekonomi terutama di beberapa sektor seperti perdagangan, barang, dan jasa, maka dapat disimpulkan bahwa sektor investasi dan tingkat angka GDP yang dimiliki Tiongkok berhasil menggeser hegemoni Amerika Serikat dalam sektor yang selalu dikuasai oleh Amerika Serikat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya perubahan penguasaan dalam beberapa sektor ekonomi yang sudah sejak lama dikuasai oleh Amerika Serikat. Dalam kurun waktu sejak tahun 1970 Amerika Serikat selalu

---

<sup>67</sup> Ibid. Halaman 54-55

<sup>68</sup> Min Ye, 2015, *China and Competing Cooperation in Asia Pasific: TPP, RCEP, and the New Silk Road*. Taylor and Francis Group. Halaman 211-212

menguasai sektor ekspor dan impor di seluruh dunia. Hal ini yang membuat Amerika Serikat memiliki pendapatan terbesar pada sektor ekspor dan impor. Namun Tiongkok berhasil menjadi negara di posisi pertama yang memiliki angka ekspor impor terbesar pada saat ini. Pergantian hegemoni antara Amerika Serikat dengan Tiongkok terjadi pada abad 21 dan Tiongkok berhasil mendominasi setelah adanya kerjasama RCEP. Perubahan inipun juga terjadi pada sektor investasi yang mengalami perubahan. Sejak 1970 sektor investasi dikuasai oleh Amerika Serikat lalu beralih dikuasai oleh kekuatan Tiongkok untuk saat ini.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Terdapat tiga motif kepentingan yang dimiliki oleh Tiongkok dalam upayanya menginisiasi kerjasama RCEP. Tiga kepentingan tersebut di antaranya ialah kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan kepentingan rivalitas Tiongkok dan Amerika Serikat terutama di kawasan Asia Tenggara. Faktor-faktor yang mendasari kepentingan ekonomi ialah sumber daya alam, sumber daya manusia, keuntungan dalam investasi dan memperluas jaringan perdagangan. Faktor yang mendasari kepentingan politik ialah memperkuat citra negara *super power*, menguasai bidang ekonomi di beberapa sektor seperti perdagangan dan investasi, mempertahankan hegemoni pada sektor perdagangan dengan negara-negara ASEAN, terakhir yaitu untuk membuat negara anggota RCEP bergantung secara ekonomi dengan Tiongkok khususnya negara berkembang. Faktor yang mendasari kepentingan rivalitas Tiongkok dan Amerika Serikat adalah untuk mengubah hegemoni di bidang ekonomi dalam beberapa sektor yang selama ini dikuasai oleh Amerika Serikat terutama di kawasan Asia Tenggara. Keberadaan kerjasama yang dibentuk oleh Amerika Serikat dinilai dapat mengancam keberadaan Tiongkok.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan terkait rivalitas Tiongkok dan Amerika Serikat terutama di kawasan Asia Tenggara menjadi motif kepentingan terkuat yang dimiliki oleh Tiongkok. Kerjasama RCEP dinilai berhasil membuat Tiongkok menggeser hegemoni Amerika Serikat dalam beberapa sektor ekonomi seperti ekspor, impor, dan investasi.

## **6.2 Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Saran ini ditunjukkan untuk beberapa negara berkembang yang menjadi anggota RCEP untuk mengkaji lebih dalam terkait peningkatan kerjasama RCEP. Hal ini dikarenakan negara-negara berkembang akan mengalami ketimpangan keuntungan, khususnya dengan negara-negara besar seperti Tiongkok ataupun Jepang.
2. Saran selanjutnya yaitu untuk Pemerintah Indonesia yang menjadi salah satu anggota RCEP. Saran yang diberikan ialah untuk mempersiapkan kepentingan yang ingin dinegosiasikan dalam kerjasama RCEP. Hal ini dilakukan untuk dapat memperoleh keuntungan yang seimbang dengan negara-negara lainnya termasuk dengan Tiongkok. Saran lainnya bagi Pemerintah Indonesia ialah untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing dengan negara-negara lainnya dalam sektor perdagangan jasa.

3. Terakhir, untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan fokus penelitian kepentingan Tiongkok dalam RCEP terutama dengan negara-negara selain dari kawasan Asia Tenggara yang juga menjadi anggota RCEP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Carlnaes, Walter, Thomas Risse and Beth A. Simmons. 2004. *Handbook of International Relations*. London: SAGE Publications.
- Cresswell, W. John. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches(4<sup>th</sup> Edition)*. USA: SAGE Publication, Inc.
- Dahl, A. Robert and Charles E. Lindblom. 1963. *Politics, Economic and Welfare (Planning and Politico-Economic System Resolved into Basic Social Proseses)*. Harper & Row Publishers: New York.
- Frankel, Joseph. 1970. *Key Concept in Political Science, National Interest*. Pall Mall Press: London
- Gilpin, Robert. 2001. *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Priceton University Press: New Jersey.
- Jackson, Robert and Georg Sorensen. 2013. *Introduction to International Relations: theories and approaches. 5th ed.* New York: Oxford University Press.
- Jack C. Plano and Roy Olton, 1988, *The International Relation Dictionary(Fourth Edition)*, Western Michigan University.
- Jagannath P. Panda, 2014, *Factoring the RCEP and the TPP: China, india and the Politics of Regional Integration*, Publisher: Roulledge.
- Keohane, O. Robert. 1984. *After Hegemoni: Cooperation and Discord In The World Political Economy*. New Jersey: Princenton University Press.
- Min Ye, 2015, *China and Competing Cooperation in Asia Pasific: TPP, RCEP, and the New Silk Road*. Taylor and Francis Group.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Organski, A.F.K. 1968. *World Politics (second edition)*. Random Hause: United States.
- Plano, C. Jack and Roy Olton. 1988. *The International Relations Dictionary (Fourth Edition)*. Western Michigan University.

Viotti, R. Paul and Mark V. Kauppi. 2012. *International Relations Theory: Fifth Edition*. Glanview: Pearson Education, Inc

Walliman, Nicholas. 2011. *Research Methods: The Basic*. New York, Routledge.

Wayne M. Morrison, 2018, *China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States*. Congressional Research Service.

Yang Jiang, 2013, *China's Policymaking for Regional Economic Cooperation*, Palgrave Macmillan: United States.

## **B. Jurnal dan Penelitian**

Bussman, Margit and John R. Oneal. 2007. *Do Hegemons Distribute Private Goods? A Test of Power-Transition Theory*. Sage Publication. Vol. 51 No. 1.

Hoadley, Stephen and Jian Yang. 2007. *China's Cross-Regional FTA Initiatives: Towards Comprehensive National Power*. Pacific Affairs: University of British Columbia. Vol. 80. No. 2.

I. William Zartman, James A. Paul and John P. Entelis, 2014, *An Economic Indicator of Socio Political Unrest*, Cambridge University Press. Vol. 2. No. 4.

John Ravenhill, 2016, *The Political Economy of an "Asian" Mega-FTA The Regional Comprehensive Economic Partnership*. The University of California Pres's. vol. 56, no. 6.

Khan, Shamsul and Lei Yu. 2013. *Evolving China-ASEAN Relations and CAFTA: Chinese Perspectives on China Initiatives in Relation to ASEAN plus 1*. University of South Australia: Australia. Vol.13 No.10.

Lemke, Douglas. 1997. *The Continuation of History: Power Transition Theory and The End of The Cold War*. Florida State University. Vol.34 No. 1.

Plesis, Du Ambrose. 2014. *The Forum on China-Africa Cooperation, Ideas and Aid: National Interest(s) or Strategic Partnership?*. London: Sage Publication. Vol. 6 No. 2.

Rafael Leak-Arcas, 2013, *China and the Regional Comprehensive Economic Partnership*. Queen Mary University of London. Vol. 35. No, 2.

Siitonen, Lauri. 1990. *Political Theories of Development Cooperation – A Study of Theories of International Cooperation*. Helsinki: World Intitute for Development Economic Research of The United Nations University. Working Paper, No.86.

William Zartman, James A Paul and John P. Entelis, 2014, *An Economic Indicator of Socio-Political Unrest*. Cambridge University Press. Vol 2, no.4.

Yin, Xiangshuo. 2004. *The Impact of The China-ASEAN Free Trade Area on Regional Trade*. Institut for National Security Strategy. Vol. 18 no.2.

### **C. Situs Internet Resmi dan Publikasi**

History of Trade	: <a href="http://www.wto.org">http://www.wto.org</a>
Regional Comprehensive Economic Partnership	: <a href="http://www.asean.org">http://www.asean.org</a>
World Bank	: <a href="https://data.worldbank.org">https://data.worldbank.org</a>
Economist Intelligence Unit	: <a href="https://store.eiu.com">https://store.eiu.com</a>
Badan Pusat Statistik	: <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
Tiongkok GNP	: <a href="http://www.ceicdata.com">www.ceicdata.com</a>
Trade in Goods	: <a href="https://data.aseanstats.org">https://data.aseanstats.org</a>